

MAARIF

ARUS PEMIKIRAN ISLAM DAN SOSIAL

SETELAH “BELA ISLAM”: GERAKAN SOSIAL ISLAM, DEMOKRATISASI, DAN KEADILAN SOSIAL



Penanggung Jawab

Ahmad Syafii Maarif

Jeffrie Geovanie

Rizal Sukma

Pemimpin Umum

Fajar Riza Ul Haq

Pemimpin Redaksi

Ahmad Imam Mujadid Rais

Wakil Pemimpin Redaksi

Muhd. Abdullah Darraz

Redaktur Tamu

Zainal Abidin Bagir

Dewan Redaksi

Ahmad Najib Burhani

Ahmad-Norma Permata

Clara Juwono

Haedar Nashir

Hilman Latief

Luthfi Assyaukanie

M. Amin Abdullah

Sekretaris Redaksi

M. Supriadi

Redaktur Pelaksana

Khelmy K. Pribadi, Ahmad Imam Mujadid Rais

Pipit Aidul Fitriyana

Design Layout

Deni Murdiani, Harhar Muhamaram

Keuangan

Henny Ridhowati

Sirkulasi

Awang Basri, Pripih Utomo

Alamat Redaksi

MAARIF Institute for Culture and Humanity

Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6, Jakarta 12810

Telp +62-21 8379 4554 Fax +62-21 8379 5758

website : www.maarifinstitute.org

email : jurnal@maarifinstitute.org

mujadid.rais@gmail.com

darrazophy@yahoo.com

Donasi dapat disalurkan melalui rekening :

Yayasan A. Syafii Maarif

BNI MH. Thamrin (Wisma Nusantara)

0114179273

Terbit Perdana Juni 2003

Redaksi mengundang para cendekiawan, agamawan, peneliti, dan aktivis untuk mengirimkan tulisan, baik berupa hasil penelitian maupun gagasan, sesuai dengan visi dan misi MAARIF Institute for Culture and Humanity. Tulisan merupakan hasil karya sendiri, belum pernah dipublikasikan, penulisan mengacu standar ilmiah yang telah ditetapkan oleh redaksi dengan panjang tulisan minimal 4000 kata (10 halaman, 1 spasi, A4) dengan batas makismal 6000 kata (15 halaman). Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit tulisan tanpa mengurangi atau menghilangkan substansi. Jurnal MAARIF terbit 2 kali setahun (Juni dan Desember).

Pengantar Redaksi

Setelah "Bela Islam": Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi, dan Keadilan Sosial	4
<i>Ahmad Imam Mujadid Rais dan Zainal Abidin Bagir</i>	

Aksi Bela Islam: Ragam Penjelasan

Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan.....	15
<i>Ahmad Najib Burhani</i>	
"Aksi Bela Islam," Akankah Mengubah Lanskap Muslim Indonesia?	30
<i>Mohammad Iqbal Ahnaf</i>	
Aksi Bela Islam, Populisme Konservatif dan Kekuasaan Oligarki	43
<i>Airlangga Pribadi Kusman</i>	
Ekonomi-Politik Aksi Bela Islam: Pluralisme dalam Krisis?	53
<i>Rizky Alif Alvian</i>	
Keadilan Semu Penodaan Agama: Aksi Bela Islam, Ruang Publik dan Dilema Negara Hukum Demokratis	71
<i>Fiqh Vredian Aulia Ali</i>	

Islam Moderat Indonesia: Terlalu Besar Untuk Gagal?

MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang.....	87
<i>Moch Nur Ichwan</i>	
Quo Vadis FPI Dalam Aksi Bela Islam.....	105
<i>Mark Woodward & Amanah Nurish</i>	
Ummat, Warga dan Ruang Kosong Pelayanan Dasar	123
<i>Abdul Gaffar Karim & Longgina Novadona Bayo</i>	
Muhammadiyah dan Aksi Damai Bela Islam : Rejuvenasi Politik Umat Islam?	135
<i>Zuly Qodir</i>	
Kematian Gus Dur dan Lahirnya Habitus Baru Kebinekaan Indonesia	156
<i>Ahmad Suaedy</i>	

Sisi-sisi Lain Aksi Bela Islam

Perempuan dan Media Dalam Aksi "Bela Islam"	168
<i>Alimatal Qibtiyah</i>	
Aksi Damai 411-212, Kesalehan Populer, dan Identitas Muslim Perkotaan Indonesia.....	188
<i>Muhammad Wildan</i>	
Solidaritas Islam dan Gerakan Sosial Pasca "Aksi Bela Islam" 2016	203
<i>Hilman Latief</i>	

Profil Penulis.....	218
Profil MAARIF Institute dan Profil Media	223
Petunjuk dan Format Penulisan Artikel	232

SETELAH “BELA ISLAM”: GERAKAN SOSIAL ISLAM, DEMOKRATISASI, DAN KEADILAN SOSIAL

SUATU PENGANTAR

Ahmad Imam Mujadid Rais dan Zainal Abidin Bagir

Aksi Bela Islam (ABI) yang berlangsung tiga kali di penghujung tahun 2016 lalu meninggalkan banyak pertanyaan. Di antara banyak pertanyaan itu adalah: mengapa tiba-tiba terjadi serangkaian peristiwa itu? Apa (atau adakah) dampaknya yang lebih jauh bagi demokrasi Indonesia? Apakah ini telah mengubah peta gerakan Islam Indonesia? Edisi Jurnal MAARIF ini berangkat dari jawaban pertama yang bisa segera diberikan dan tidak sulit disepakati: bahwa peristiwa ini tidak terjadi dengan “tiba-tiba”. Tugas selanjutnya adalah menarasikan dengan lebih cermat faktor-faktor yang menyumbang rangkaian peristiwa tersebut—dan itu perlu dilacak hingga ke beberapa tahun sebelumnya, sampai sekitar tahun 1998, atau bahkan lebih jauh.

Pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah seberapa signifikan gerakan di akhir 2016 tersebut? Akankah ia bertahan lama, mengubah peta Indonesia, atau setidaknya peta gerakan Islam Indonesia? Ataukah ia akan segera hilang dengan berlalunya Pilkada DKI 2017, yang menjadi arena pergerakan itu? Karena itulah edisi jurnal ini, yang secara terfokus mengangkat peristiwa tersebut sebagai titik sentralnya, mengandung resiko bahwa ia melakukan *over-estimate* dan segera menjadi tak relevan.

Jika kemudian, dengan menyadari resiko tersebut, kami tetap memutuskan membuat edisi ini, itu karena sebetulnya, terlepas dari apa yang terjadi di akhir 2016 itu, sudah cukup lama kami merasa perlu untuk melihat ulang peta Islam Indonesia. Ide awalnya telah muncul di akhir 2015, setahun sebelum

ABI. Ketika itu MAARIF Institute sempat mengundang Robert Hefner dan memintanya untuk membantu keinginan melihat ulang peta Islam Indonesia itu.

Islam dan Demokrasi Pasca-1998

Tidak lama setelah Reformasi, Bob Hefner menerbitkan *Civil Islam* yang memberikan gambaran optimis tentang peran Muslim dalam demokratisasi Indonesia, dengan menunjuk khususnya pada dua organisasi Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini aktif mendorong demokratisasi melalui sistem pemilu yang demokratis, penegakan hukum, fatwa anti korupsi, mendorong *good governance*, serta aktif dalam pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui pendirian fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial. Kesemuanya berkontribusi dalam menciptakan kehidupan demokratis yang lebih baik (*Civil*). Tapi pada saat yang sama, ia sebetulnya juga menunjukkan bahwa ada kekuatan-kekuatan Muslim lain yang bergerak ke arah berbeda atau bahkan bertentangan.

Hampir dua dasawarsa setelah Reformasi, dan 15 tahun setelah gambaran optimis *Civil Islam* itu dipaparkan, lanskap Islam dan demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Martin van Bruinessen, misalnya, mencatat adanya *conservative turn*. Sementara sejarawan Merle Rickleffs, di ujung jilid terakhir dari tiga bukunya yang membahas Islamisasi di Jawa sejak abad ke-14, melihat bahwa gerakan islamisasi kini telah mencapai titik yang tak bisa kembali lagi.

Episode terakhir yang baru-baru ini, menjelang akhir tahun 2016, muncul adalanya serangkaian aksi “Bela Islam” yang berhasil memobilisasi amat banyak Muslim di Jakarta yang tampak mengejutkan banyak pengamat. Mengapa gerakan ini melaju bak bola salju yang terus membesar dan mendapat simpati secara luas dari masyarakat? Apakah serangkaian aksi “Bela Islam” (1, 2, 3) tersebut merupakan isyarat dari gambaran tentang Muslim Indonesia yang telah berubah?

Keterkejutan banyak orang atas aksi-aksi tersebut muncul dengan latar belakang anggapan bahwa Islam Indonesia, seperti yang kerap diiklankan, adalah model Islam yang toleran, damai dan, lebih jauh, mendukung cita-cita demokrasi. Sementara Gerakan “Bela Islam” dipicu oleh tuduhan spesifik tentang penodaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama, namun juga telah menyentuh banyak isu lain seperti munculnya kembali sentimen

anti-Cina, ketidakadilan ekonomi dan politik, hingga kekhawatiran di sektor keamanan dengan aktifnya sel-sel kelompok radikal. Salah satu aspek lain yang menuntut perhatian adalah gerakan itu telah membawa dampak ke wilayah-wilayah Indonesia Timur di mana Muslim menjadi minoritas seperti Manado dan Kupang dengan aktifnya laskar-laskar serupa dengan di Jakarta.

Dapat diduga bahwa kebijakan pemerintah secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada bergesernya pendulum keberislaman masyarakat. Di masa kepemimpinan SBY misalnya, pemerintah menjalankan kebijakan untuk merangkul ulama-ulama yang berada dalam MUI dengan kehadirannya yang strategis pada Rakornas MUI 26 Juli 2005. Dalam pidatonya, SBY menegaskan sikapnya yang terbuka untuk menerima masukan, saran, dan fatwa dari MUI. Sebagian sarjana seperti Platzdach dan Najib Burhani berpendapat bahwa ketika fatwa-fatwa dari MUI lahir, fatwa ini menjadi legitimasi sekelompok masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan kepada kelompok lain yang berbeda pandangan keagamaannya. Situasi serupa tampaknya terjadi di masa kepemimpinan Joko Widodo dengan leluasanya kelompok-kelompok intoleran memaksakan kehendaknya kepada sebagian yang lain.

Narasi kebangkitan ekonomi Cina di tingkat dunia juga mengalami reperkusinya di tanah air, yang memperumit persoalan. Kebijakan pemerintahan Jokowi yang membuka investasi asing secara luas, memunculkan kekhawatiran di sebagian masyarakat bahwa pendulum kebijakan luar negeri Indonesia akan berorientasi Beijing. Dalam benak awam, Cina selalu diidentikkan berideologi komunis, walau kebijakan ekonominya telah berevolusi demikian jauh. Narasi-narasi bahaya kuning bertebaran di media sosial dan di tengah masyarakat, termasuk dikaitkan dengan Pilkada DKI. Pada poin ini, isu kesenjangan muncul tidak terhindarkan. Secara ekonomi, etnis minoritas memegang porsi signifikan dari kue ekonomi nasional. Kampanye untuk memboikot produk-produk asing, serta adanya gerakan untuk membangun ekonomi secara mandiri pasca gerakan Aksi “Bela Islam” menunjukkan bagaimana keresahan ini demikian kuat dirasakan oleh masyarakat.

Kekhawatiran munculnya kekuatan gerakan teroris juga menyeruak di tengah menguatnya mobilisasi gerakan ini. Sidney Jones sempat mengutarakan analisanya menjelang aksi 411. Sejauh mana gerakan terorisme, yang mengancam keamanan nasional, terlibat dalam perkembangan terakhir ini, dan, sebaliknya, adakah pengaruh dari perkembangan terakhir itu (Bela Islam) pada penguatan terorisme?

Ragam Penjelasan: Soal Identitas atau Kelas?

Bagaimana menjelaskan fenomena ABI, khususnya ABI III, yaitu keberhasilan mobilisasi ratusan ribu, atau bahkan ada yang mengklaim hingga jutaan, Muslim di sekitar Tugu Monas? Ini terkait dengan pertanyaan tentang bagaimana menamai perkembangan ini. Apakah ini ungkapan intoleransi sekelompok kecil Muslim, suatu tahapan baru yang lebih tinggi dari rangkaian ekspresi dan manifestasi intoleransi yang dilakukan beberapa organisasi sentral pendukung ABI selama 15 tahun terakhir ini? Tapi lalu bagaimana menjelaskan dukungan yang tampak begitu meluas, sebagaimana ditunjukkan dalam Aksi 212, sementara organisasi-organisasi itu tak memiliki banyak pendukung sebelumnya, —apalagi jika dibandingkan dengan dua organisasi Islam terbesar yang telah eksis sejak lebih dari 100 tahun terakhir di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama? Ataukah, menggunakan istilah yang belakangan kerap digunakan untuk menjelaskan kemenangan Donald Trump di AS dan Brexit di Inggris, ini adalah sebentuk “populisme”?

Dua penjelasan yang bersaing itu disebut oleh sebagian penulis di jurnal ini sebagai penjelasan identitas atau kultural dan penjelasan ekonomi-politik, struktural atau kelas. Penjelasan yang pertama akan menamai gerakan ABI, khususnya Aksi 212, sebagai menguatnya kelompok intoleran atau radikalasi Muslim. Penjelasan kedua akan menyebutnya, sebagaimana frase yang belakangan ini dipopulerkan Vedi Hadiz, sebagai “populisme Islam”. Dalam kenyataannya, dalam diskusi di Yogyakarta pada pertengahan Januari 2016 itu, para penulis menyepakati bahwa kompleksitas peristiwa ini tak bisa dengan mudah direduksi ke salah satu penjelasan tersebut.

Jurnal edisi ini dibuka dengan tulisan dari Ahmad Najib Burhani. Dalam tulisannya, Najib mengungkapkan bahwa Aksi Bela Islam menunjukkan terjadinya fragmentasi otoritas keagamaan. Dalam hal pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah dan NU masih menjadi rujukan. Namun dalam hal otoritas keagamaan, telah terjadi fragmentasi: dua organisasi itu tidak lagi menjadi referensi. Yang menjadi referensi adalah ustaz-ustaz selebriti populer dan kerap muncul di TV. Mereka lebih banyak dirujuk, karena lebih mudah dimengerti, ketimbang orang-orang yang umumnya berasal dari pimpinan organisasi keagamaan Islam yang sudah ada. Sisi lainnya adalah transformasi konservatisme. Apa yang sebelumnya tampak seperti tabu, misalnya penggunaan istilah kafir, sekarang bertransformasi menjadi menjadi bagian dari arus-utama, bahkan *pop culture*. Terakhir, tak bisa dilupakan aspek politik oligarki ABI. Sulit membayangkan gerakan yang demikian besar jika saja tidak ada Pilkada DKI

yang demikian kompetitif dan melibatkan tokoh-tokoh utama di panggung politik nasional, seperti Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto, kontestan sengit Joko Widodo di Pilpres 2014.

Mohammad Iqbal Ahnaf merefleksikan apakah terjadi perubahan lanskap Umat Islam pasca Aksi Bela Islam tersebut. Ia juga mempertanyakan, apakah sikap moderat adalah karakter umat Islam Indonesia dalam lanskap tersebut? Iqbal tidak bertujuan untuk memberikan jawaban yang tegas terhadap pertanyaan ini karena dalam pandangan penulis ideologi moderat di Indonesia bukanlah sesuatu yang sudah ajeg; ia mengalami pasang surut dan seringkali bersifat relatif tergantung pada isu, konteks dan wilayah. Merujuk pada Antonio Gramsci, penulis menunjukkan dalam tulisannya mengenai gambaran tentang “perang posisi” yang sedang berlangsung antara beragam kelompok Muslim di Indonesia. ABI adalah satu gerakan dalam tarik-menarik itu, suatu bagian dari “perang posisi” sebagaimana yang diungkapkan oleh Gramsci tadi. Di sini, dua hal yang perlu diperhatikan adalah wacana dan ruang.

Wacana konservatisme yang terungkap dalam sentimen anti-Ahok mempertemukan kelompok-kelompok vigilantisme, Wahabi, juga pengusung ide khilafah. Pertemuan beberapa kelompok itu membantu mobilisasi, namun juga yang mesti diperhitungkan adalah adanya struktur politik-ekonomi yang terbuka bagi pemapanan peran kelompok radikal, sebagaimana ditunjukannya dengan gamblang dalam beberapa peristiwa yang biasa disebut sebagai “kasus intoleransi”. Mobilisasi kelompok radikal tidak hanya bersifat ideologis, tetapi, menurut Iqbal, terkait dengan akses terhadap sumberdaya politik dan ekonomi. Dalam risetnya tentang Yogyakarta, Iqbal menemukan adanya oligarki yang terbangun dalam relasi saling menguntungkan antara elit politik, pemilik modal dan massa yang dikendalikan oleh kelompok paramiliter intoleran. Masa depan ABI, atau gerakan-gerakan serupa bergantung pada kemampuan narasi sektarian mengimbangi narasi pluralis dan sejauh mana struktur sosial politik membuka diri bagi kelompok-kelompok tersebut.

Airlangga Pribadi lebih tegas menggunakan perspektif ekonomi politik, relasinya dengan kekuatan-kekuatan oligarki, juga bagaimana hubungannya dengan *Civil Islam*. Penulis berpendapat bahwa Aksi Bela Islam dalam beberapa hal patut dikhawatirkan, karena di satu sisi menunjukkan menggejalanya konservatisme dalam politik Islam di Indonesia. Tapi penulis melihat bahwa konservatisme itu bukan merupakan suatu hal yang otonom dari pertarungan

yang sudah muncul pasca-otoritarianisme yang ditandai oleh faksi-faksi oligarki di Indonesia. Yang patut kita lihat adalah adanya kecenderungan faksi-faksi oligarki itu merangkul atau mengafirmasi wacana-wacana konservatisme yang sedang menggejala atas nama “populisme Islam”. Ini terkait dengan munculnya perasaan termarginalisasi, ketakutan akan hal yang lain.

Kecenderungan kekuatan oligarki untuk merangkul Aksi Bela Islam tidak bisa dilepaskan dari formasi populisme Islam, terutama sejak era pasca-otoritarianisme. Aliansi konservatisme dengan oligarki muncul sebagiannya karena kelompok-kelompok *civil Islam* tidak mampu memberikan jawaban-jawaban yang memadai terhadap kondisi krisis dan dislokasi sosial yang muncul. Penentu nasib *civil Islam* di masa depan adalah kemampuannya melakukan intervensi politik di akar rumput.

Senada dengan Airlangga Pribadi, Rizky Aliv mengkombinasikan dua perspektif yang telah muncul untuk memahami ABI, yaitu, analisis identitas/kultural dan perspektif ekonomi-politik. Ia merujuk pada konsep “dislokasi” Laclau: terjadinya perbedaan antara pengalaman sehari-hari masyarakat dengan narasi yang berusaha merangkainya. Argumen utama penulis adalah narasi populisme yang tampak dalam Aksi Bela Islam adalah narasi yang mengisi *gap* yang terjadi karena narasi pluralisme gagal. Narasi Aksi Bela Islam tentang isu toleransi, dengan mengatakan bahwa justru mereka yang menjaga umat Islam dari intoleransi Ahok, membelokkan narasi pluralisme untuk mendukung gerakan mereka. Narasi tentang kelompok di balik Aksi Bela Islam yang suka menggunakan kekerasan ditampik dengan kenyataan bahwa aksi itu berjalan “super damai” dan bergerak dalam koridor demokrasi. Narasi tentang persatuan nasional juga diberi pengertian bahwa justru mereka yang menjaga persatuan nasional dari kata-kata kasar Ahok.

Pertanyaannya kemudian adalah kenapa narasi Aksi Bela Islam itu bisa dipercaya oleh orang-orang yang bergabung dalam aksi yang berasal dari kelas-kelas yang berbeda dan karena itu pengalaman dislokasinya tentu juga berbeda? Ini tidak mudah dijawab. Tapi salah satu basis konstituen dari kelompok-kelompok dalam Aksi Bela Islam itu adalah kelompok yang dalam terminologi Marxis disebut “lumpenproletariat”. Narasi Aksi Bela Islam mampu beresonansi, lebih dari alternatif-alternatif lain, dengan pengalaman keseharian orang-orang yang termaginalkan akibat efek “surplus pekerja”. Bagi Rizky, populisme Islam tak hanya menggunakan Islam sebagai alat politik, tetapi juga sebagai basis bagi identitas mereka. Narasi identitas keislaman dalam populisme itu hidup karena

narasi arus utama tentang Islam Indonesia yang pluralis tak dapat memberikan penjelasan memuaskan untuk marjinalisasi yang dirasakan banyak Muslim.

Adanya dua perspektif yang digunakan untuk memahami ABI itu, yaitu analisis kultural/identitas dan analisis ekonomi-politik (yang sampai tingkat tertentu berarti analisis kelas), menjadi perdebatan hangat dalam diskusi penulis di Yogyakarta. Untuk menilai yang mana yang menjelaskan fenomena ABI dengan lebih baik, kita masih memerlukan data yang lebih lengkap. Misalnya, tentang profil peserta Aksi 212. Siapakah sebenarnya yang datang ke Monas pada 2 Desember 2016 itu? Dari pengamatan yang tak terlalu mendalam, nyatanya mereka melampaui batas-batas kelas sosial-ekonomi (kelas bawah hingga kelas menengah ke atas yang terdidik), maupun batas-batas identitas (konservatif-moderat; anggota NU, Muhammadiyah, ibu-ibu majelis taklim, FPI atau kelompok-kelompok radikal). Pertanyaan lain adalah tentang motivasi para peserta mengikuti aksi tersebut. Apakah motivasinya ideologis, atau ada alasan-alasan lain yang lebih pragmatis? (Pertanyaan terakhir ini nanti akan dibahas oleh Zuly Qodir.) Pada akhirnya, kedua cara analisis itu mungkin tidak harus dilihat sebagai alternatif, yang satu meniadakan yang lain. Fenomena ABI terlalu kompleks untuk dianalisis dengan hanya menggunakan satu lensa. Ini kiranya merupakan wawasan penting yang perlu diperhatikan dalam perdebatan akhir-akhir ini di antara kedua kubu.

Tulisan selanjutnya melihat satu unsur lain yang tidak dapat diabaikan juga, yaitu faktor pemicu yang membuka energi ketidakpuasan yang lalu menjadi serangkaian Aksi Bela Islam. Yaitu tuduhan penodaan agama kepada Ahok. Isu penodaan agama nyata merupakan alat ampuh mobilisasi, karena mudah menyentuh perasaan religius banyak orang, termasuk mereka yang bahkan tidak melihat peristiwa dengan lengkap. Tulisan Fiqh Vredian Ali membahas isu tersebut dari perspektif hukum. Ia melihat ada persoalan mendasar pada rezim hukum di Indonesia, yang mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiganya masih konservatif dalam hal proses regulasi, dan ini menjadi penghalang dalam pengarusutamaan upaya rekonsiliasi, khususnya dalam kasus undang-undang penodaan agama dan pasal 156a KUHP. Sistem hukum di Indonesia masih memakai sistem yang merupakan warisan dari zaman kolonialisme dari Belanda. Dalam ilmu hukum sebenarnya ada perdebatan sengit antara paradigma positivistik versus paradigma realis, dan belakangan muncul paradigma dari *critical legal studies* yang berupaya menawarkan perspektif berbeda. Namun alternatif paradigma itu belum menjadi norma hukum di

Indonesia, sehingga seprogresif apapun interpretasi hukum akan dipatahkan oleh interpretasi yang berdasarkan perspektif positivistik.

Ruang Persaingan Organisasi-Organisasi Islam

Bagian kedua jurnal ini menampilkan lima tulisan yang ingin menjawab di mana posisi organisasi-organisasi Islam dalam perkembangan belakangan ini. Lima tulisan secara berturut-turut membahas perubahan dalam MUI, FPI, beberapa organisasi Islam baru yang lebih kecil, diikuti dengan Muhammadiyah dan NU. Pertanyaan yang kerap diajukan, khususnya, di mana posisi Muhammadiyah dan NU, dua organisasi tertua dan terbesar dalam peristiwa-peristiwa itu? Apakah keduanya kalah pengaruh dibanding organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh yang relatif belum lama muncul? Dan bagaimana prospeknya?

Nur Ichwan secara khusus menyoroti evolusi MUI, Ia berargumen bahwa MUI bukan aktor utama gerakan ABI dan “pendapat dan posisi keagamaan MUI” tidak dapat dibayangkan pengaruhnya yang luas tanpa adanya peran GNPF-MUI yang meningkatkannya menjadi “fatwa MUI”, lalu mengadvokasinya melalui berbagai media, forum, dan jaringan. Namun tanpa legitimasi “fatwa MUI”, gerakan ABI tidak dapat dibayangkan juga akan mendapatkan simpati dan dukungan dari umat Islam secara luas, terutama “umat mengambang” dan “umat terambang”, yang menjadi pokok analisis penulisnya.

Mark Woodward dan Amanah Nurish melihat organisasi lain yang cukup sentral, yaitu Front Pembela Islam. Setidaknya ada tiga analisa dasar keduanya. Pertama, peristiwa tersebut bukan representasi keseluruhan komunitas Muslim Indonesia, namun hasil koalisi dari kelompok-kelompok konservatif yang sebetulnya memiliki orientasi teologis yang berbeda, bahkan bertentangan. Namun mereka dipersatukan oleh identitas Muslim, aspirasi pelaksanaan hukum Syari’ah dan ekslusivisme. Kedua, peristiwa tersebut telah memberikan FPI dan pemimpinnya, Habib Rizieq Syihab, sebuah kesempatan untuk menghapus memori kolektif mengenai kekerasan yang dilakukan oleh FPI di masa lalu, dan memberikan jalan untuk memasuki politik arus utama. Ketiga, penting pula dilihat bahwa FPI bukannya tak mendapatkan perlawanan, khususnya di antara kelompok-kelompok perempuan, namun gerakan oposisi ini belum dapat direalisasikan sebagai bentuk mobilisasi sosial.

Abdul Ghaffar Karim dan Longgina Novadona Bayo melihat sisi yang berbeda dan jarang diperhatikan dalam pembahasan mengenai Aksi Bela Islam, yaitu

kelompok-kelompok di luar Jakarta yang mengirim anggotanya untuk ikut berpartisipasi di Monas. Ghaffar dan Nova meneliti kelompok-kelompok seperti itu di Yogyakarta, yaitu kelompok-kelompok yang kecil seperti Majelis Taklim, yang bisa disebut sebagai *unheard Civil Islam*. Mereka diterima masyarakat karena mampu mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan negara, yaitu pelayanan-pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, serta memberikan solusi untuk persoalan-persoalan keseharian. Berbeda dari Hizbut Tahrir atau kelompok Salafi, misalnya, dalam kelompok-kelompok kecil itu, teologi datang belakangan, namun mereka pertama kali mengisi ruang kosong tersebut bagi masyarakat kelas bawah. Permasalahan sosial semacam ini sebenarnya secara tradisional merupakan ladang Muhammadiyah dan NU. Tapi dalam pandangan kedua penulis, pelayanan pendidikan dan kesehatan Muhammadiyah dan NU kini kurang menjangkau mereka. Ketika kebutuhan masyarakat bawah itu terpenuhi, terjalinlah kesetiaan dengan pemimpinnya, sehingga mudah untuk dimobilisasi.

Mengenai Muhammadiyah, Zuly Qodir memaparkan risetnya di beberapa propinsi pasca Aksi Bela Islam. Pertanyaan yang diajukannya adalah tentang sikap politik Muhammadiyah dalam merespon perkembangan terakhir ini. Dalam risetnya, penulis menemukan banyak sekali dukungan terhadap Aksi Bela Islam itu. Banyak pimpinan atau ustaz Muhammadiyah ikut dalam aksi 411 dan 212. Senada dengan Alimatul Qibtiyah dan Muhammad Wildan (keduanya menulis di jurnal ini), ia melihat Islam dalam Aksi Bela Islam itu sebagai Islam populer. Memang ada yang mengikuti aksi itu dengan alasan ideologis; ada juga yang mengikuti secara partisan, karena mereka ikut partai atau kelompok tertentu; tapi sebagian besar, menurutnya, mengikutinya karena itu fesyen.

Ahmad Suaedy menulis mengenai munculnya habitus baru kebinekaan di Indonesia pasca kematian Gus Dur. Tesisnya adalah bahwa meningkatnya gerakan radikal dan intoleran di Indonesia, yang memberikan sumbangan penting pada Aksi-aksi Bela Islam, tidak berjalan sendiri. Di sisi yang berseberangan, ada gerakan yang menawarkan dialog, toleransi, dan kebinekaan yang juga mengalami peningkatan. Gerakan ini menawarkan apa yang disebut Suaedy sebagai habitus baru kebinekaan. Ia membahas panjang mengenai habitus baru itu, yang di antaranya juga bisa dilihat dalam proses pemakaman Gus Dur. Dari proses pemandian hingga dikubur, banyak orang dari berbagai latar belakang, lintas kelompok internal Islam hingga lintas agama, ikut berkunjung, berziarah dan mendoakan. Peringatan haul Gus Dur, hingga kini selalu diiringi doa dari orang-orang dari berbagai agama. Haul Gus Dur ini terjadi di banyak tempat,

diadakan berbagai cabang GusDurian. Penulis menekankan perlunya melihat habitus-habitus baru semacam ini: bahwa arus penguatan kebinedekaan juga terjadi di tengah munculnya gejala konservatism di Indonesia.

Tiga tulisan terakhir membahas sisi-sisi lain Aksi Bela Islam. Alimatul Qibtiyah mencoba melihat peran perempuan dan bagaimana perempuan diposisikan pada Aksi “Bela Islam” tersebut dan juga bagaimana media memframing isu tersebut. Dengan mengkaji empat media yang berbeda dan latar ideologi yang variatif, kajian Alimatul menemukan hal yang menarik terkait dengan peran perempuan dalam Aksi Bela Islam.

Tulisan berikutnya oleh Muhammad Wildan menunjukkan gambaran berbeda mengenai Aksi Bela Islam. Tak serta-merta mengisyaratkan telah berubahnya lanskap keislaman Indonesia menuju Islamisme, ia justru melihat bahwa Aksi-aksi tersebut lebih merupakan bagian budaya populer, *popular piety*. Tesis penulis adalah bahwa Islam yang ramah masih merupakan *mainstream*. Yang menyatukan kebanyakan peserta aksi adalah adanya *common enemy*.

Tulisan terakhir, dari Hilman Latief, melihat seberapa kuat solidaritas yang dibangun dari isu Aksi Bela Islam? Dan sekuat apa ia bertahan? Sudah banyak upaya dilakukan untuk memelihara solidaritas itu. Ada gerakan salat subuh berjamaah, gerakan 161, dan lain-lain. Upaya ini tampak dilanjutkan terus, karena memang tidak mudah untuk memelihara solidaritas. Jika isunya hanya jangka pendek untuk menjegal Ahok, gerakan itu tidak akan bertahan lama. Konsep Bela Islam berbeda dari isu Palestina, yang lebih mudah dipahami. Bagaimana konsep “bela Islam” mendapatkan kandungan substansinya akan menentukan seberapa lama aliansi GNPF-MUI dan kelompok-kelompok yang terlibat Aksi Bela Islam bertahan.

Pertanyaan terakhir ini cukup penting: sejauh manakah gerakan yang dimulai dengan serangkaian Aksi Bela Islam itu dapat bertahan. Hal ini sulit diprediksi, karena, mirip dengan alasan yang diajukan Hilman, kita masih perlu melihat bagaimana aliansi dari beragam kelompok-kelompok Muslim yang amat berbeda itu dapat mengembangkan agendanya atau memperluasnya. Terlepas dari itu, banyak penulis menyampaikan optimismenya bahwa dengan segala perubahan yang masih terus terjadi, masa depan Indonesia yang demokratis-pluralis masih memiliki peluang baik. Ini tentu tidak menafikan keharusan untuk menangkap isyarat adanya keresahan, ketidakpuasan, dan aspirasi-aspirasi lain yang ditunjukkan oleh munculnya serangkaian Aksi Bela Islam. Dan, kemudian, meresponnya dengan baik.

Ucapan Terimakasih.

Jika edisi jurnal ini berhasil membantu memberikan pemahaman lebih baik bagi pembaca, apresiasi pertama harus diberikan pada masing-masing penulis yang dengan kesungguhannya bersedia menyelesaikan tulisan mereka dalam waktu yang cukup singkat, dan kerjasama mereka untuk segera melengkapi dan merevisinya. Dalam Jurnal edisi kali ini, redaksi dibantu oleh seorang Redaktur Ahli, Zainal Abidin Bagir dari Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Untuk mempercepat proses penulisan, dan memastikan bahwa tema edisi ini dibahas dengan cukup solid, kami menyelenggarakan seminar penulis yang terbatas dalam rangka penerbitan jurnal ini pada 19-20 Januari 2017. Azis A. Fachruddin mengikuti seminar tersebut dan membantu menuliskan catatan yang bermanfaat untuk penulisan pengantar ini dan revisi yang dilakukan penulis. Seminar tersebut tidak akan berhasil diselenggarakan tanpa bantuan PP. Muhammadiyah Yogyakarta, yang menyediakan tempat diskusi kami, dan The Asia Foundation (TAF) yang membantu mendatangkan para penulis. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Sandra Hamid, Budhy Munawar-Rahman, dan Ahsan Jamet Hamidi, yang ketiganya juga hadir dan aktif di hari pertama diskusi.

Selamat Membaca!



PEREMPUAN DAN MEDIA DALAM AKSI “BELA ISLAM”

Alimatul Qibtiyah

Abstrak

Banyak kalangan menyebut bahwa Aksi “Bela Islam” pada akhir 2016 adalah suatu kejadian yang fenomenal dan menarik perhatian, baik media maupun peneliti gerakan sosial keagamaan. Peran perempuan di Aksi “Bela Islam” (ABI) pada posisi logistik dan kebersihan, bukan sebagai top leader yang punya panggung. Hal ini ditegaskan dengan istilah ABI yang mengacu pada “ayah” dalam bahasa Arab. Porsi perempuan yang terlihat di denah lokasi di Monas lebih dari 1/3 (sepertiga) menunjukkan ada perhatian pada perempuan.

Berdasarkan data baik berupa gambar, visual dan juga teks yang ada pada empat media cetak: Media Umat, Majalah Gontor, Suara Muhammadiyah dan juga SKH Kedaulatan Rakyat, menunjukkan bahwa Media Umat sangat gigih dan mendukung ABI dengan menggunakan bahasa yang mempunyai tingkat intensitas tinggi, seperti “Ahok Harus Tersangka” atau “Umat Wajib Marah”. Sementara Majalah Gontor lebih menekankan pada isu kepemimpinan bahwa pemimpin Muslim lebih baik. Suara Muhammadiyah lebih menekankan pada kekhawatiran terpecah belahnya umat Islam sehingga perlu ada seruan bersatu. ABI menurut Suara Muhammadiyah lebih disebabkan karena tersumbatnya aspirasi umat Islam dan juga ketidakadilan pada umat Islam. Terakhir SKH Kedaulatan Rakyat menunjukkan sikap netral pada ABI. Bahkan tidak ada rekomendasi yang jelas terkait dengan isu Aksi “Bela Islam”.

Kata Kunci: ABI, Perempuan, Media

Pendahuluan

Aksi “Bela Islam” (ABI) akhir 2016 memang mengejutkan berbagai kalangan baik secara nasional maupun internasional. Aksi ini tidak hanya menarik bagi para simpatisan tetapi juga para peneliti dan pengamat gerakan sosial keagamaan. Beberapa beragumentasi bahwa aksi ini akan menjadi momentum pecah belahnya ummat Islam sebagaimana di tempat lain. Namun kelompok lain berargumen bahwa ada kekuatan penggerak yaitu akidah yang justru dapat menyatukan ummat Islam dari berbagai kalangan dan ormas. Sebenarnya tidak hanya masalah isu akidah, tetapi isu politik, ekonomi dan juga ketidakadilan digunakan untuk mengerakkan Aksi Bela Islam tersebut.

Di saat bicara mengenai gerakan sosial keagamaan, maka sebenarnya di dalamnya juga termasuk gerakan feminis Islam yang sarat dengan isu keadilan perempuan dan juga bagaimana media melakukan *framing* isu tersebut. Tulisan ini akan melihat peran perempuan dan bagaimana perempuan diposisikan pada Aksi “Bela Islam” (ABI) tersebut dan juga bagaimana media melakukan *framing* isu tersebut. Media yang dipilih adalah pada tulisan ini adalah empat media cetak yaitu Tabloid Media Ummat (HTI), Majalah Gontor, Suara Muhammadiyah, dan SKH Kedaulatan Rakyat. Pemilihan media ini didasarkan pada kecenderungan variasi ideologi keagamaan dari yang konservatif sampai yang progresif.

Pada umumnya perempuan diposisikan bukan sebagai *top leader* tetapi lebih sebagai pelengkap dan penyemarak serta diberi tugas secara dominan pada urusan logistik dan kebersihan. Tanpa harus merendahkan urusan logistik dan kebersihan, namun secara politik ABI cenderung patriarkhis dan mengilustrasikan seolah komunikasi dengan Tuhan itu dominasi laki-laki. Bahkan istilah ABI (Aksi ‘Bela Islam’) itu juga mengarah pada bahasa Arab yang berarti ayah (laki-laki).

Peran Perempuan Islam di Tengah Maskulinitas “Bela Islam”

Di saat bicara tentang peran perempuan di kegiatan yang berskala nasional seperti Aksi “Bela Islam” (ABI), maka tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan feminis Islam di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah dinamika relasinya dengan internal aktivis perempuan sendiri, kelompok Islamis, kelompok pembaharuan atau kelompok progresif, politik gender pemerintah dan juga relasi kemitraan

internasional.¹ Pada kasus ABI maka sebenarnya yang paling berpengaruh adalah faktor politik keagamaan dari kalangan Islamis. Jika melihat prestasi gerakan perempuan dalam sejarah maka sebenarnya tidak terlalu khawatir akan pengaruh ABI terhadap kehidupan perempuan secara langsung. Namun jika hal serupa terulang-ulang dan semakin menguatnya kalangan tektualis maka otomatis ini akan berpengaruh terhadap kehidupan perempuan. Sebagaimana diketahui bahwa kecenderungan berfikir orang yang tektualis ini berdampak pada kehidupan dan posisi perempuan yang kurang baik.

Yang dimaksud kalangan Islamis adalah kalangan tektual yang cenderung memahami teks-teks keagamaan secara harfiah. Pendekatan ini menghasilkan ajaran-ajaran yang bersifat normatif dan tektual termasuk ajaran-ajaran yang diambil dari teks-teks utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Pendekatan ini cenderung mengabaikan karya para ulama dari periode klasik.² Bila ditafsirkan dengan cara ini, makna dari teks atau ayat apa pun tidak menjadi problematik; semuanya diterima seolah-olah tafsir itu tidak dibentuk oleh kelompok orang tertentu dan dalam kurun sejarah tertentu. Maknanya sepenuhnya dianggap sebagai pemaknaan yang dinisbatkan langsung pada makna ketika teks tersebut pertama kali diwahyukan.

Kelompok tektualis mengklaim bahwa ajaran-ajaran agama tidak pernah berubah sepanjang sejarah dan pemahaman atas ajaran-ajaran tersebut sama sekali tidak boleh diubah sedikitpun meskipun masyarakat telah berubah. Dari perspektif mereka, makna-makna yang dianggap orisinal tersebut tetap sah dan berlaku untuk semua zaman dan di segala tempat. Pendekatan terhadap teks semacam ini menghasilkan ajaran-ajaran yang konservatif dan menekankan dogma yang memerintahkan kepatuhan mutlak pada apa yang dianggap sebagai kewajiban-kewajiban agama, tanpa penambahan. Bahkan, tidak boleh ada penggunaan bahasa daerah dalam ritual apa pun. Secara umum, kelompok literalis menentang filsafat pembaharuan, termasuk pandangannya tentang gender dan feminism. Mereka mengklaim bahwa gender dan feminism merupakan ideologi-ideologi Barat yang tidak sesuai dengan tradisi Islam. Bahkan, mereka berargumen bahwa orang-orang yang mengikuti ideologi apa pun di luar Islam berarti telah melanggar hukum Islam dan menentang Tuhan.³

1 Alimatal Qibtiyah, “Indonesian Muslim Women and The Gender Equality Movement.” *Journal of Indonesian Islam*. 03.01 (2009): 168-196.

2 Amin Abdullah, *Hermeneutic method*. Paper presented at the Short Course Southeast Asia: Islam, Gender and Reproductive Rights, 2002. lihat juga di Mubarok M. Zaki. *Genealogi Islam radikal di Indonesia: Gerakan, pemikiran dan prospek demokrasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008.

3 J. Burhanudin & O. Fathurahman, *Tentang perempuan Islam: Wacana dan gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & PPIM UIN Jakarta, 2004.

Para penganut kelompok ini sendiri bukan entitas yang homogen. Di Indonesia, mereka terbagi secara organisasi dan berbeda pendapat mengenai beberapa persoalan. Namun, sebagian persepsi fundamentalis mengenai persoalan gender adalah sama—mereka pada umumnya memahami teks-teks keagamaan secara harfiah. Para penganutnya mungkin berasal dari masyarakat kolot/konservatif, kelompok-kelompok radikal, fundamentalis atau revivalis seperti, FPI, Lembaga Dakwah Kampus (LDK), gerakan Tarbiyah, Hizbut Tahrir dan gerakan Dakwah Salafi.⁴

Walaupun kelompok dominan yang menggerakkan ABI adalah kelompok yang mempunyai kecenderungan pemikiran tidak progresif seperti HTI, FPI, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), namun dalam kenyataannya yang hadir dari kalangan moderat juga banyak seperti para anggota Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Berdasarkan pengamatan di lapangan, kedatangan mereka bukan berarti mendukung kepemimpinan FPI untuk ummat Islam. Banyak di antara mereka yang sebenarnya dari kalangan Islam yang tengahan atau kelompok washotiniyah yang tidak ingin disebut sebagai orang yang “ANTI Islam”. Bahkan di beberapa tempat, suasana di Monas saat aksi 212 seperti festival karena dimana ada kerumunan maka di situ dapat dijadikan sebagai mengais rezeki. Juga banyak wajah ceria yang swafoto baik secara berkelompok maupun sendiri.⁵ Gambar 1 menunjukkan bagaimana keceriaan yang tergambar pada wajah para perempuan yang ikut berpartisipasi pada Aksi “Bela Islam” tanggal 2 Desember 2016.



Sumber: Kiriman WA



Sumber: acehtribunnews.com

Gambar 1: Keceriaan Perempuan dalam partisipasi Aksi “Bela Islam”

Berdasarkan denah aksi 212 di Monas pada Gambar 2, panitia memberikan ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam aksi yaitu sekitar lebih dari 1/3 lokasi. Perlakuan secara umum terhadap perempuan juga memuliakan. Hal ini

⁴ Mubarok, 2008, lihat juga di Y. Machmudi, *Islamising Indonesia: The rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*. Canberra: Australian National University, 2008.

⁵ Observasi, Aksi “Super Damai Bela Islam” di Monas Jakarta, 2 Desember 2016.

bisa jadi karena konsep perang, jika Aksi Bela Islam dikategorikan perang, maka memang konsep perang dalam Islam harus memuliakan anak dan perempuan. Namun di luar denah tersebut karena peserta membludak, maka segregasi laki-laki dan perempuan sudah tidak terlihat. Layaknya di Masjidil Haram bagian luar, laki-laki dan perempuan campur. Sebagai seorang perempuan, saat melakukan observasi partisipan, penulis juga tidak mengalami kendala. Bahkan penulis menunaikan sholat jumat diapit oleh bapak bapak.



Gambar 2: Denah Lokasi Aksi “Bela Islam”

Namun jika diamati lebih detail, kebijakan yang diambil cenderung seperti Orde Baru yang memposisikan perempuan bukan sebagai bagian dari *top leader* yang mendapatkan panggung sentral, tetapi lebih pada peneguhan politik identitas

para laki-laki. Istilah *State ibuism* yang dikenalkan oleh Julia Suryakusuma dalam bukunya yang berjudul *Sex, Power and Nation*⁶ menyebutkan bahwa ideologi gender Orde Baru lebih menekankan model satu macam bentuk keluarga, yaitu istri men-support karier suami dan tidak sebaliknya. Pada acara ABI tidak ada tokoh perempuan yang menjadi narasumber atau mempunyai panggung utama dan dicover media. Kebanyakan peran perempuan di area logistik dan bersih-bersih. Walaupun banyak juga laki-laki yang ikut andil juga di urusan tersebut. Berikut salah satu laporan media Kabar Selebes terkait peran perempuan di area logistik di acara ABI.

“Massa aksi Bela Islam III, yang terpusat di Jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Palu Timur, Palu, Sulawesi Tengah, tampaknya cukup terbantu dengan keikutsertaan para perempuan berhijab Syar’i ini. Pasalnya, dalam aksi super damai kali ini, mereka menjamin konsumsi para peserta aksi 2 Desember 2016, dengan menyediakan 2.000 bungkus makanan”.⁷



Sumber: tribunnews.com



<http://www.kabarselebes.com/2016/12/beginilah-cara-perempuan-berhijab-syari-dukung-aksi-bela-islam-iii-palu/>



BREAKING NEWS

TIK KEBERSIHAN TAMAN DAN JALAN SIAP



<http://blog.al-habib.info/wp-content/uploads/2016/12/aksi-bela-quran-212-mo-nas-jutaan-muslim-tim-kebersihan-taman.jpeg>



Sumber: suara-Islam.com

Gambar 3: Peran Logistik dan Kebersihan Perempuan di ABI

6 Suryakusuma, J. I. *Sex, power, and nation: An anthology of writings, 1979–2003*. Jakarta, Indonesia: Metafor, 2004, 161-188.

7 Kabar Selebes, Beginilah Cara Perempuan Berhijab Syari Dukung Aksi Bela Islam III, <http://www.kabarselebes.com/2016/12/beginilah-cara-perempuan-berhijab-syari-dukung-aksi-bela-islam-iii-palu/> diakses pada tanggal 25 Januari 2017.

Di antara cara menggerakkan perempuan adalah dengan memberikan fatwa yang disosialisasikan melalui media. Berikut salah satu contoh artikel terkait dengan hukum perempuan berdemo pada salah satu tabloid Media Umat yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Yang menarik, walaupun perempuan boleh berdemo, tetapi ada empat syarat yaitu diizinkan suami, mengenakan busana muslimah, tidak *tabarruj* dan tidak mengeluarkan suara yang mengundang syahwat.⁸

Gambar 4: Hukum Muslimah berdemo



Sumber: Tabloid Media Ummat

Berita tentang keterlibatan perempuan dalam ABI tidak banyak dibahas dalam media *mainstream*, termasuk di Tabloid Media Ummat (HTI), Majalah Gontor, Suara Muhammadiyah, dan SKH Kedaulatan Rakyat yang menjadi pilihan riset ini. Pada tulisan berikutnya akan dibahas bagaimana media tersebut melakukan *framing* pada isu ABI tersebut.

Kontestasi Ideologi Media pada Aksi “Bela Islam”

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana media melakukan *framing* terhadap Aksi “Bela Islam”. Analisis *framing* bisa diartikan bahwa media membingkai suatu peristiwa yang disadur dari sebuah realita, kemudian realita peristiwa tersebut dikonstruksi oleh media. Realita yang telah lahir atau tercipta dalam konsep semuanya telah dibuat oleh wartawan atau pembuat berita. Baik segala bentuk fakta, peristiwa, kejadian, semuanya telah dinarasikan atau diabstraksikan menjadi sebuah berita dan informasi yang kemudian dipublikasikan kepada

⁸ M Shiddiq Al Jawi, Hukum Wanita Muslimah Ikut Demo, *Tabloid Media Umat*, edisi 184, 4-17 Safar H/4-17 November 2016, 26.

khalayak luas (masyarakat). Dari situlah masyarakat mulai mengakses, apa yang diberitakan dan diinformasikan oleh media dan menerima jika memang itu adalah sebuah kebenaran tanpa tahu jika itu adalah realita yang sudah dikonstruksi oleh media. Pada dasarnya dalam penggunaan analisis *framing* ini adalah harus dilihat terlebih dahulu bagaimana sebuah media mengkonstruksi sebuah realita/fakta. Sebuah sikap dukungan atau bukan dukungan, negatif ataupun positif, semuanya hanyalah sebagai efek dan bingkai yang dibangun oleh media, bukan semata-mata ciri khas atau keadaan yang nyata seperti apa yang ada.⁹

Sedangkan dalam analisis kali ini, penulis menggunakan analisis framingnya Robert N. Entman, dimana dalam analisis *framing* Entman lebih menonjolkan pada seleksi isu dan penonjolan aspek dari fakta tertentu. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan 4 kerangka secara spesifik: *Define Problems* (pendefinisian masalah), *diagnose cause* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *Make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Dari pemilihan isu dan menonjolkan aspek tertentu dari situasi sebuah peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat, kemudian wartawan menentukan porsi-porsi tertentu yang akan dimasukkan dalam kolom berita baik apa yang akan dimuat, diliput, dibuang, disembunyikan dari khalayak, dan apa yang akan ditonjolkan. Semuanya telah disusun secara sistematis tanpa ada kecurigaan masyarakat bahwa berita yang disajikan merupakan hasil konstruksi dari sebuah fakta di lapangan.¹⁰ Selain itu juga akan dipaparkan data-data visual pada empat media cetak yang dipilih yaitu, Tabloid Media Umat, Majalah Gontor, Majalah Suara Muhammadiyah dan SKH Kedaulatan Rakyat.

1. Tabloid Media Umat Edisi 184, 4.17 Nov 2016, Hal. 1-17.



9 Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKis, 2011), hlm. 7.

10 *Ibid*, hlm. 221-224.



Nasib Para Penghina Islam

Sejak Nabi SAW diutus sebagai Rasul, penghinaan terhadap Islam sudah muncul dengan berbagai bentuknya. Penghinaan itu ditujukan kepada diri Rasul maupun ayat-ayat Allah. Beberapa di antaranya:

Nama	Ulah	Kebijakan	Tindakan
Abdullah bin Ubay bin Salul	Menghina Nabi SAW dan kaum Muslimin. Dikenal sebagai biangnya orang munafik	Dibiarkan oleh Nabi "Agar tidak ada orang yang berkata Muhammad membunuh para sahabatnya"	-
Abhalah ibnu Ka'b ibnu 'Auf Al-Aswad Al-Ansi di Yaman	Mengaku sebagai Nabi	Perintah bunuh melalui surat	Dibunuh oleh seorang bernama Fairuz
Musailamah Al-Kadzdzab dari Najed	Nabi palsu	Perangi	Dihabisi di zaman Khalifah Abu Bakar
Ka'b ibnu Al-Asyraf	Menghina Nabi SAW	Perintah bunuh	Dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah
Abu Rafi' Abdullah ibnu Abi Al-Huqaiq	Menghina Nabi	Perintah bunuh	Dibunuh oleh beberapa orang Anshar
Perempuan hamba sahaya	Selalu hina Nabi	-	Dibunuh oleh suaminya sendiri yang tunanetra. Nabi menyebut wanita itu layak dibunuh dan suaminya dibebaskan
Wanita Yahudi	Selalu hina Nabi	-	Dicekik oleh seorang Muslim. Nabi menyatakan kehalalan darah

- a. Pendefinisian masalah. Ahok harus dijadikan tersangka
 - Fatwa MUI bahwa Ahok harus diproses hukum karena: "Nistakan Agama Islam dan Nodai Al-Qur'an"
 - "Hinakan Ulama dan Lecehkan Ummat"
- b. Memperkirakan masalah atau sumber masalah. Adanya isu wacana politik, sehingga Ahok belum disahkan sebagai tersangka, sehingga dalam hal ini polisi ragu, padahal tidak ada wacana politik sedikitpun. Polri harus benar-benar professional, tanpa harus izin kepada Presiden terkait dengan penetapan Ahok sebagai tersangka. Seharusnya Polri melihat ini sebagai masalah hukum. Jika Polri tidak segera bertindak maka dengan adanya kasus penistaan agama ini akan membuat umat Islam berada pada puncak kekesalan terhadap Ahok. Selain itu, dalam kasus ini ada intervensi dari Pemerintah, jadi tidak diherankan lagi jika ada penguluran-penguluran waktu dalam memeriksa dan menjatuhkan hukuman kepada Ahok.
 - Secara linguistik/bahasa, di dalam media umat ini terlihat sangat kanan dalam pemikirannya sangat keras sekali. Sehingga bisa dikatakan ini adalah media garis keras yang ketika melihat atau menyikapi kasus terkait dengan agama, ummat, kitab suci dan ulama akan ditindak secara adil sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.
- c. Membuat keputusan moral. Pemerintah dan Polri tidak professional dalam menangani kasus Ahok.
 - Kasus penistaan Agama bisa memicu kekisruhan besar.
 - Jika Ahok tidak menjadi tersangka itu menunjukkan bahwa Negara melindungi Ahok, ini menjadi bukti yang sangat nyata, bahwa hukum di Negara ini mandul karena telah tunduk dengan kekuasaan.
 - Tuntutan umat terus mengalir, walaupun klarifikasi Ahok dengan mendatangi Bareskrim Mabes Polri pun tidak menyurutkan niat kaum muslimin untuk terus mendesak pemerintah.
 - Dan dinyatakan bahwa pemimpin kafir itu haram.
- d. Menekankan penyelesaian. Sebaiknya Polri dan Pemerintah bertindak tegas dalam menyikapi permasalahan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
 - Meminta dengan tegas kepada Presiden dan Polri untuk segera dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk menangkap dan memproses hukum bagi Ahok.
 - Sebagai pelaku atau oknum yang sudah menistakan agama apalagi orang kafir maka hukumannya adalah mati.

Pembahasan

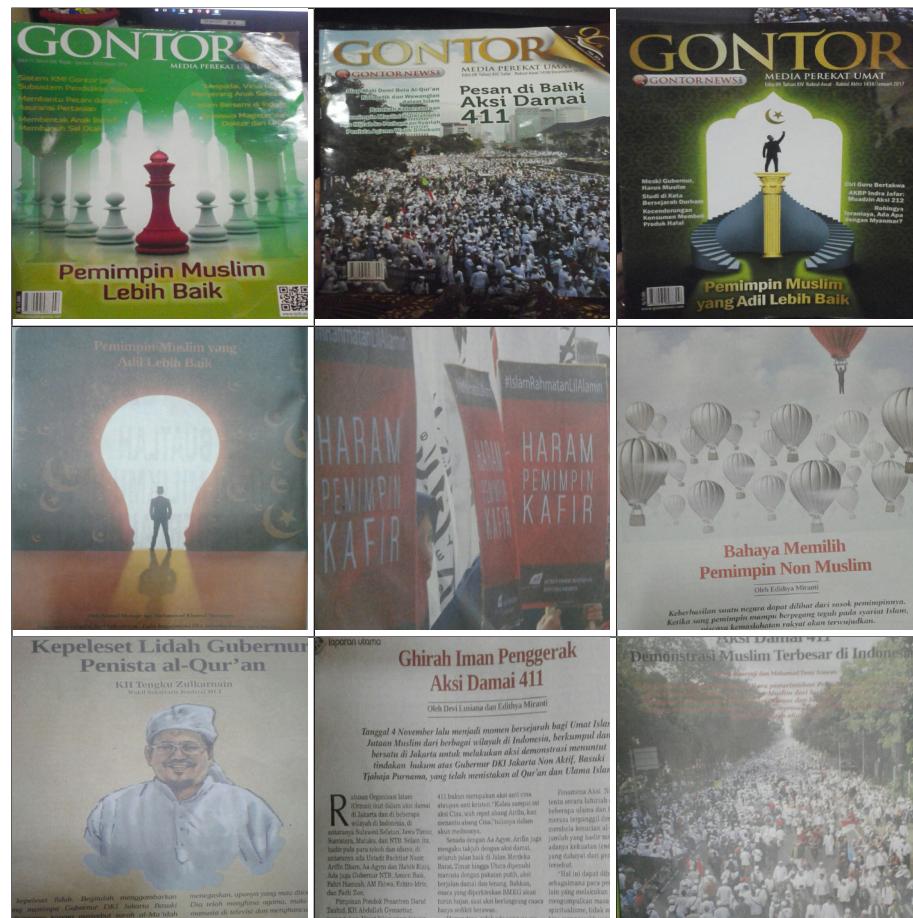
Berdasarkan dari data visual dan teks yang ada dalam Tabloid Media Umat dan juga jumlah artikel, berita dan juga gambar-gambar yang dipilih, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada negosiasi terkait dengan kasus Ahok yang dianggap sebagai penista agama. Pilihan kata yang digunakan juga mempunyai intensitas

yang tinggi seperti “harus tersangka”, “wajib marah” dan juga “perangi”. Di Media Umat ini terlihat tidak ada ketetralan, karena jelas dinyatakan bahwa tidak ada ampun bagi penista agama. Hal ini dapat dipahami karena Media ini adalah media yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menjadi salah satu penggerak dalam Aksi “Bela Islam”.

2. Majalah Gontor: Media Perekat Umat.

Untuk Majalah Gontor ada tiga edisi yang terkait dengan Isu kepemimpinan dan Aksi “Bela Islam”, yaitu:

- Pemimpin Muslim Lebih Baik, Edisi 11 Tahun XIII Rajab-Sya'ban 1437/Maret 2016, Hal.9-12
- Pesan di Balik Aksi Damai, 411, Edisi 08 Tahun XIV Safar-Rabiul Awal 1438/Desember 2016, Hal. 9-
- Pemimpin Muslim yang Lebih Adil dan Lebih Baik, Edisi 09 Tahun XIV Rabiul Awal-Rabiul Akhir 1438/Januari 2017, hal. 6-66.



a. Pendefinisian masalah

- Pemimpin Muslim lebih baik dan bahaya memilih pemimpin non-muslim. (Majalah Gontor Edisi 11, maret 2016).
- Ada pesan dibalik aksi damai 411: Demonstrasi muslim terbesar di Indonesia yang damai
- Penista Agama Wajib dihukum
- Ghirah Iman Penggerak Aksi Damai 411.
- Kepleset Lidah Gubernur Penista Al-Qur'an. (Majalah Gontor, Edisi 08 Desember 2016).
- Pasca bela Islam 212: Kontroversi di balik Aksi Bela Islam 212, antara penguasa, tokoh agama dan umat.
- Sikap terhadap Aksi Bela Islam.
(Majalah Gontor Edisi 09, Januari 2017).

b. Memperkirakan masalah atau sumber masalah

- Kepemimpinan Muslim didasarkan pada QS. Al-Maidah ayat 51, QS. An-Nisa:139, QS. An-Nisa ayat 144. (Majalah Gontor Edisi 11, maret 2016).
- Ada kecenderungan umat memilih pemimpin non-muslim boleh jadi karena mereka tidak mengetahui larangan Allah ini, karena itulah tugas Ulama, Da'i atau Kiyai untuk menyampaikan ayat-ayat Allah ini kepada mereka agar mereka tidak salah pilih. Belum banyak informasi adanya pemimpin muslim yang berkualitas, amanah, dan memiliki integritas tinggi.
- Jika kepemimpinan dipegang oleh non muslim, walaupun sekilas dinilai baik, namun mereka tidak akan mau mengurus tentang permasalahan miras, perzinaan, dan lain-lain. Sebagaimana fenomena kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ahok atau yang memiliki nama asli Basuki Tjahaja Purnama, dan Wali Kota Solo, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo, yang keduanya adalah non-muslim. Selama sebagai orang nomor satu di daerah yang mayoritas muslim, banyak mengeluarkan kebijakan yang kontroversi karena menyimpang dari ajaran Islam. (Majalah Gontor Edisi 11, maret 2016).
- Sebelum aksi damai 212 sebagai kelanjutan Aksi Bela Islam 411 yang bertepatan pada 4 November 2016 sebagai tuntutan umat kepada Presiden agar memberikan hukuman pada penista Agama. Secara khusus pada Aksi Bela Islam 2 ini menoreh pesan yang berarti bagi umat Islam. Karena bentuk solidaritas, kebersamaan, kepedulian antar umat tanpa memandang usia, latar belakang sosial, dan sebagainya. Kesejukan dan kedamaian seolah terlihat jelas di dalamnya. Semua bersatu tanpa ragu. Dan tidak terlihat kerusuhan atau bentrok. Ada pesan tersirat yang dikemukakan oleh Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir: "aksi 411 bukan gerakan politik", "peserta aksi damai harus menjaga persatuan Indonesia, dan ukhuwah Islamiyah, hindari anarkisme dan jangan merusak fasilitas umum karena gerakan

kita adalah gerakan menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Bukan gerakan politik!” (Majalah Gontor, Edisi 08 Desember 2016).

- Aksi bela Islam 3 ini ternyata telah menyulut kecemasan penguasa terhadap umat yang berhimpun menjadi satu kesatuan di Monas Jakarta. Sampai pada prosesnya pihak POLRI, POLDA telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah umat muslim mengikuti Aksi III (ABI), seperti menyebarkan flyer melalui Helikopter di Jakarta, adapun isi flyer tersebut menyerukan agar umat tidak berhimpun di MONAS. Selain itu POLRI juga mengirimkan surat resmi kepada POLDA di berbagai daerah di Indonesia, begitupun dengan POLDA yang menemui para pengusaha bus, toko-toko Islam agar umat tidak ikut dalam acara Aksi Bela Islam III. Tujuan ini dilakukan agar masa yang ikut berjumlah sedikit. (Majalah Gontor Edisi 09, Januari 2017).
- Ternyata ada hal yang menarik dalam ABI III ini, beberapa tokoh agama seperti Gus Mus (K.H. Mustofa Bisri), K.H. Said Agil Siradj (Ketum PBNU), dan lain-lain ternyata senada atau sependapat dengan penguasa bahwa umat dilarang datang ke Jakarta untuk membentuk suatu himpunan. Selain itu dari oknum-oknum NU juga ada yang mengatakan bahwa shalat jum’at di jalana itu sama saja bid’ah. Penguasa juga melalui kapolri mengimbau kepada masyarakat/umat agar acara Aksi Bela Islam III di gelar di MONAS yang pada awalnya akan diadakan di bundaran HI. Dari sinilah mulai muncul juga adanya kontroversi antara umat, tokoh agama dan penguasa. Bukan itu saja, ternyata kontroversi tersebut juga muncul dari dalam tubuh Islam itu sendiri. Seperti apa yang dikemukakan oleh Pimpinan Majalah Gontor (Adnin Armas), kritiknya walaupun dengan jumlah fantastis umat Islam berkumpul menjadi satu di Aksi Bela Islam III, apakah aksi serupa dengan berkumpulnya umat dengan jumlah yang banyak akan terulang kembali? Dirasa sulit hal itu akan terulang kembali dengan porsi yang sama, karena sesama umat Islam itu sendiri saja masih berbeda paham baik mengenai masalah-masalah furuiyyah, aspirasi politik, ormas, atau berbagai kepentingan ekonomi, dan sebagainya yang selama ini dipandang sebagai salah satu faktor yang menjauhkan umat dengan sesama saudara seiman. Himpunan yang terlihat dalam ABI 3 hanyalah bentuk dari pada kuantitas umat Islam. Dengan demikian, masih banyak sudut-sudut yang memang menunjukkan umat Islam masih lemah dalam segi kualitas baik dalam ekonomi, politik, pendidikan, budaya, media dan di berbagai aspek. Sebenarnya potensi itu ada tapi karena belum berada di dalam satu komando. Walaupun dikatakan bahwa Islam di Indonesia merupakan bagian terbesar di dunia sekalipun. (Majalah Gontor Edisi 09, Januari 2017).
- Untuk megetahui sikap Majalah Gontor terhadap Aksi Bela Islam. Akhi bisa menyimak isi majalah ini. Edisi Desember Majalah Gontor bahkan mengangkat laporan utama bertajuk “Pesan di Balik Aksi Damai 411”.

Di luar itu masih ada sejumlah tulisan yang isinya dukungan terhadap Aksi Bela Islam. Diantaranya bertajuk: "Siap Mati Demi Bela Al-Qur'an", "Penista Agama Wajib dihukum", dan "Penghina Nabi dan Hukumannya". Selain memberikan dukungan melalui media pemberitaan, baik melalui Majalah Gontor.com, kami juga memberikan dukungan secara langsung dengan ikut menjadi peserta aksi dan dukungan logistik. Kendati tidak ada himbauan untuk mengikuti Aksi Bela Islam, namun hampir semua kru dan manajemen Majalah Gontor ikut turun ke lapangan, baik aksi 411 maupun aksi 212. (Majalah Gontor Edisi 09, Januari 2017).

c. Membuat keputusan moral

- Di dalam media cetak Gontor terlihat bahwa pemimpin muslimlah yang baik untuk memimpin suatu daerah ataupun Negara, bukan dari kalangan non-muslim, seperti yang terjadi pada kepemimpinan DKI Jakarta dan Solo. Perbandingannya salah satunya dengan pemimpin muslim di Surabaya, yang dipimpin oleh orang muslim. Hal ini dianggap lebih baik karena umat yang dipimpin mayoritas muslim. (Majalah Gontor Edisi 11, maret 2016).
- Keberhasilan suatu Negara dapat dilihat dari sosok pemimpinnya. Ketika sang pemimpin mampu berpegang teguh pada syariat Islam, niscaya kemaslahatan rakyat akan terwujud. (Majalah Gontor Edisi 11, maret 2016).
- Aksi bela Islam III (ABI) pada 2 Desember 2016 yang diselenggarakan oleh GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia) memang sangat fenomenal dan menarik banyak perhatian. Jutaan umat berkumpul menjadi satu tanpa adanya kerusuhan (damai). Dari peristiwa tersebut setidaknya umat Islam mampu bekerjasama dan bekerja keras meraih tujuan bersama agar kehidupan umat Islam menjadi lebih baik. (Majalah Gontor Edisi 09, Januari 2017).

d. Menekankan penyelesaian.

- Sebaiknya yang menjadi pemimpin di daerah ataupun negara berasal dari orang Islam bukan non-muslim. (Majalah Gontor Edisi 11, maret 2016).
- Seharusnya Menteri Dalam Negeri menegur Ahok. Kalau sudah tiga kali menegur tidak diindahkan, diberhentikan dengan
- membuat surat rekomendasi kepada Presiden.
- Membangun kebersamaan antara semua golongan baik dari kalangan masyarakat biasa, ulama, bahkan sampai tokoh nasional sekalipun. (Majalah Gontor, Edisi 08 Desember 2016).
- Umat Islam merajut kesatuan, menyambungkan semangat dan etika kebersamaan.
- Umat harus mengedepankan sikap simpati dan empati kepada sesama umat Islam. Selain bekerjasama, gotong-royong, penuh pengorbanan, kesungguhan terhadap agama, ulama serta nilai-nilai mulia.

Pembahasan

Berdasarkan data gambar, judul artikel mapun isi dari teks yang ada di tiga majalah Gontor, menunjukkan bahwa gaya bahasa atau linguistik di media ini tidak sekemas bahasa yang ada di dalam Media Umat, walaupun keduanya sama-sama setuju dan mendukung pada Aksi “Bela Islam” (Majalah Gontor Edisi 11, maret 2016). Intensitas bahasa yang digunakan tidak sekuat di Media Umat, bahkan masih ada bahasa yang ada yang disampaikan oleh Ahok dengan kata “Lidah Kepleset”, artinya ada unsur ketidaksengajaan.

Artikel-artikel yang ada lebih banyak membahas kepemimpinan muslim daripada isu Penista Agama, walaupun di Majalah disampaikan bahwa mereka mendukung ABI, tapi sebenarnya di Pondok sendiri tidak terlalu ada pembahasan bahkan tidak ada pengerasan untuk ikut ABI di Alun-alun Ponorogo.¹¹ Selain itu jumlah artikelnya pun juga tidak sebanyak artikel yang ada di Media Umat.

3. Suara Muhammadiyah: Meneguhkan dan Mencerahkan “Aspirasi Umat Tersumbat”, Edisi No. 01 TH Ke-102, 1-15 Januari 2017.



a. Pendefinisian masalah

- Refleksi Pasca Bela Islam. ABI dikarenakan tersumbatnya aspirasi Islam dan juga karena adanya perbedaan pandangan antara umat Islam dalam melihat ABI, dan belum adanya persatuan umat Islam.

11 Wawancara dengan Santri Gontor 2, Ahabullah Fakhri Muhammad, tanggal 27 Januari 2017.

b. Memperkirakan masalah atau sumber masalah

- Tiga rentetan Aksi Bela Islam yang puncaknya pada 2 Desember atau yang dikenal sebagai aksi 212 sungguh mengagumkan. Kekuatan penggeraknya adalah aqidah. Yakni umat muslim yang keyakinan agamanya terluka akibat oleh Ahok. Denyut nadi keagamaan mayoritas umat Islam yang masih direndahkan, dilecehkan dan dinodai bergelora menjadi kesadaran kolektif. Dorongan aksi tersebut terjadi bisa dikatakan sebagai motif politik, karena musuh yang dihadapi sama, yakni non muslim (Ahok). Semua organisasi Islam dari berbagai aliran atau kelompok saling bernegosiasi untuk menyampaikan aspirasi umat sesuai koridor hukum, demokrasi dan perilaku.
- Jika mengaca pada sejarah, masa-masa berdirinya Republik ini, umat Islam berdarah-darah memperjuangkannya. Akan tetapi tidak lama setelah kemerdekaan diraih tepatnya pada tahun 1948, justru umat Islam menjadi korban keganasan komunis. Setelah pembantaian terjadi akhirnya umat Islam melawan dan menumpas PKI. Perjuangan umat Islam tidak dapat diremehkan. Bagaimanapun umat Islam adalah penduduk mayoritas di Negeri ini. Walaupun demikian kondisi umat sekarang sudah sangat terjepit, baik ekonomi maupun politik. Sumbatan aspirasi tersebut akhirnya meminggirkan peran umat Islam dalam semua aspek berbangsa dan bernegara. Umat Islam hanya menjadi penonton dan penikmat beragam suguhan produk ekonomi, tingkah laku politik dan perilaku budaya ini disebabkan oleh umat Islam yang kurang mampu menyatukan gerak dan visinya untuk umat dan bangsa. Mereka mudah dipecah belah oleh pihak lain. Maka untuk mengembalikan kekuatan Islam, perlu ada kohesifitas kekuatan. Perlu ada negosiasi untuk saling.

c. Membuat keputusan moral

- Dari aksi damai tersebut dapat dilihat tidak hanya sebagai eksistensi satu kelompok Islam. Tapi aksi 212 diletakkan sebagai aspirasi seluruh umat Islam yang menuntut keadilan hukum atas penistaan agama. Jadi, setiap komponen Islam mulai belajar saling bernegosiasi untuk menyampaikan aspirasi hal tersebut ditandai dengan adanya kehadiran Presiden RI Ir Joko Widodo dan Wakil Presiden Dr (HC) HM Jusuf Kalla pada aksi tersebut menunjukkan sikap yang baik, meski pada aksi itu terdapat tokoh seperti Habib Rizieq yang sering disebut orang bergaris keras.

d. Menekankan penyelesaian.

- Dengan menyuarakan aspirasi yang sama, jangan sentuh wilayah keyakinan agama, serta tegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu
- Kelompok Islam moderat boleh memberi catatan khusus terhadap kelompok Islam berhaluan keras untuk lebih memahami keragaman kultur umat dan rakyat Indonesia.
- Kekuatan umat harus disatukan, baik dalam gerak sektor ekonomi, politik bahkan keagamaan.

- Berdayakan dan satukan umat sekaligus membangun Indonesia yang berkemajuan.

Pembahasan

Suara Muhammadiyah tidak menggunakan bahasa yang bersifat kekerasan, tetapi lebih melihat akar persoalannya adalah karena relasi umat Islam dan pemerintah dan kekhawatiran akan keretakan umat Islam. Berdasarkan artikel dan judul-judul dalam Suara Muhammadiyah, terlihat bahwa media ini tidak mengutarakan bahwa kepemimpinan Non-Muslim atau masalah Penista Agama tetapi lebih membahwa ABI pada isu-isu sejarah, solidaritas, politik-ekonomi, sosial, agama.

4. **Kedaulatan Rakyat, 3 Desember 2016/ 3 Mulud 1950/Tahun LXXII No.067), Hal. 1-7.**



- a. Pendefinisian masalah: Aksi Damai
- b. Memperkirakan masalah atau sumber masalah:
 - Hal tersebut dipicu dengan adanya permasalahan dugaan penistaan agama, lalu muncullah bela Islam. Hal tersebut dilakukan dilaksanakan karena umat Islam merasa terusik, hingga pada akhirnya melakukan aksi damai yang luar biasa atau disebut aksi 212. Di dalam kegiatan aksi damai atau bela Islam 212 ini umat Islam melakukan dzikir dan do'a bersama, bahkan Presiden dan wakil presiden pun turut berpartisipasi dalam kegiatan dzikir dan do'a bersama.
- c. Membuat keputusan moral
 - Kegiatan bela Islam tersebut dilakukan dengan “aksi damai” yang dihadiri oleh kurang lebih 2 juta orang Islam.

- Secara keseluruhan di dalam media ini juga aksi damai kemarin itu mendapatkan banyak pujian karena selain berlangsung aman, peserta juga sangat tertib.
 - Seperti apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya: “peserta juga memperhatikan kebersihan, sehingga sampah tidak terlihat berserakan.”
- d. Treatmen Recommendation. Terkait dengan bela Islam 212/aksi damai tersebut tidak ada rekomendasi yang jelas.

Pembahasan

SKH Kedaulatan Rakyat terlihat netral dan hanya memberitakan dengan posisi netral. Secara umum gerakan Aksi Bela Islam dalam media ini terlihat netral. Karena hanya menonjolkan Aksi Bela Islam 212/aksi damai saja. Pilihan katanya juga tidak kontroversi seperti Media Umat dan Majalah Gontor.

Berdasarkan empat media cetak di atas, isu perempuan tidak dominan, bahkan hanya Media Umat yang memuatnya dengan tujuan mobilisasi—karena mengatakan bahwa hukum demo bagi perempuan boleh. Hampir tidak ada yang secara khusus memperbincangkan perempuan pada Aksi Bela Islam baik di media konvensional maupun di media sosial. Karena yang paling dominan adalah isu agama dan politik. Bisa dikatakan bahwa ABI adalah aksi maskulinitas. Walau banyak yang berargumen bahwa aksi super damai 212 adalah bukan aksi politik, namun saat wawancara dengan beberapa warga Jakarta yang punya hak pilih di Pilkada mereka mengatakan bahwa “Pilkada DKI tidak ada duanya, maksudnya tidak ada nomer duanya yang ada 1 dan 3 yang Muslim”.¹² Walaupun dengan nada canda saat menyampaikan hal tersebut dengan spontan.

Khotbah Habib Rizieq juga menekankan bahwa al-Qur'an itu suci sehingga harus di atas konstitusi dan Al Maidah 51 harus ditegakkan. Artinya pemimpin harus Muslim, menurut ketua FPI tersebut. Selain itu, jika disimak pidato Kapolri yang menyatakan bahwa polisi berani membuat Ahok tersangka. Padahal KPK yang sudah beberapa kali memeriksa Ahok, namun Ahok tidak pernah jadi tersangka. Hal ini menguatkan perseteruan KPK dan Polri belakangan ini. Kehadiran RI 1 dan 2 yang rela berjalan di tengah hujan sepanjang 200 meter, menunjukkan usaha *scalling up* secara politis yang perlu dicatat. Hal ini menarik mengingat banyak peserta yang beranggapan bahwa RI 1 mlarikan diri. Karena jangkauan *sound system* yang tidak memadai sebagian jamaah, bahkan tidak tahu

12 Wawancara dengan Arif, 12 Desember 2016

kalau bapak presiden hadir. Baru tahu setelah melihat TV.¹³ *Scalling up* yang dilakukan bapak Presiden sebelum sampai pada keikutsertaan dalam sholat jumat 212 adalah upaya safari ke sejumlah ormas, orpol, TNI, POLRI dan juga sejumlah tokoh Nasional. Setidaknya ada 16 kunjungan atau silaturahmi yang dilakukan oleh Jokowi sejak peristiwa 411 sampai 212, di antaranya PB Nadlatul Ulama, PP. Muhammadiyah, Munas LDII, PKB, PAN, PPP, Golkar, PDIP, Gerindra yang mana ada tokoh nomer 1 di masing-masing ormas atau partai ataupun TNI dan POLRI yang diajak diskusi.

Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan data-data yang ada dapat disimpulkan bahwa peran perempuan di Aksi “Bela Islam” (ABI) lebih dominan pada posisi logistik dan kebersihan. Memang ada perhatian pada perempuan dengan disediakannya area khusus bagi perempuan di lebih dari 1/3 (sepertiga) lokasi saat ABI di Monas. Peran lain perempuan adalah sebagai penggembira dan bahkan “asesoris” yang ditandai dengan keceriaan dalam foto-foto yang beredar di media sosial. Istilah ABI yang mengacu pada “ayah” dalam bahasa Arab menegaskan bahwa ABI adalah dunia laki-laki sebagai sentralnya, karena pada realitasnya yang mendapatkan panggung utama adalah laki-laki.

Berdasarkan data baik berupa gambar, visual dan juga teks yang ada pada media cetak: Media Umat, Majalah Gontor, Suara Muhammadiyah dan juga SKH Kedaulatan Rakyat, menunjukkan bahwa Media Umat sangat gigih dan sangat mendukung ABI dengan menggunakan bahasa yang mempunyai tingkat intensitas tinggi, seperti Ahok Harus Tersangka, Umat Wajib Marah. Sementara Majalah Gontor lebih menekankan pada isu kepemimpinan yang mana pemimpin Muslim lebih baik. Walaupun secara substansi mendukung ABI, namun terdapat artikel yang memperlihatkan ada unsur ketidaksengajaan seperti “Kepleset Lidah”. Selain itu pilihan katanya tidak sepedas pilihan kata di Media Umat. Untuk Suara Muhammadiyah lebih menekankan pada kekhawatiran pecah belahnya umat Islam sehingga perlu ada seruan bersatu. ABI, menurut Suara Muhammadiyah, lebih disebabkan karena tersumbatnya aspirasi umat Islam dan juga ketidakadilan pada umat Islam. Terakhir, SKH Kedaulatan Rakyat menunjukkan sikap netral pada ABI. Bahkan tidak ada rekomendasi yang jelas terkait dengan isu Aksi “Bela Islam”.

13 Observasi partisipan, 12 Desember 2016

Akhirnya, menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan akan berubahnya Islam yang damai dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan laki-laki dan perempuan menjadi Islam yang anarkis dan diskriminatif. Walaupun hal ini tetap menjadi kewaspadaaan karena jika Islam berhaluan keras mendominasi dan berpengaruh besar di masyarakat, maka dapat dipastikan kehidupan perempuan Islam Indonesia menjadi kurang beruntung. Variatifnya media yang kebanyakan masih menunjukkan Islam Indonesia yang santun memperkuat argumen bahwa Islam Indonesia Insya Allah tidak akan mudah diceraiberaikan.



Daftar Pustaka

- Abdullah Amin, Hermeneutic method. Paper presented at the Short Course Southeast Asia: Islam, Gender and Reproductive Rights, 2002. lihat juga di Mubarok M. Zaki. Geneologi Islam radikal di Indonesia: Gerakan, pemikiran dan prospek demokrasi. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008.
- Burhanudin, J., & Fathurahman, O. Tentang perempuan Islam: Wacana dan gerakan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & PPIM UIN Jakarta, 2004.
- Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Iseologi, dan Politik Media, Yogyakarta: LKis, 2011.
- Kabar Selebes, Beginilah Cara Perempuan Berhijab Syari Dukung Aksi Bela Islam III, <http://www.kabarselebes.com/2016/12/beginilah-cara-perempuan-berhijab-syari-dukung-aksi-bela-Islam-iii-palu/> diakses pada tanggal 25 Januari 2017.
- Mubarok, 2008, lihat juga di Machmudi, Y. *Islamising Indonesia: The rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*. Canberra: Australian National University, 2008.
- Qibtiyah Alimatul, "Indonesian Muslim Women and The Gender Equality Movement." *Journal of Indonesian Islam*. 03.01 (2009): 168-196.
- Suryakusuma, J. I. *Sex, power, and nation: An anthology of writings, 1979–2003*. Jakarta, Indonesia: Metafor, 2004, 161-188.
- M Shiddiq Al Jawi, Hukum Wanita Muslimah Ikut Demo, Tabloid Media Umat, edisi 184,4-17 Safar H/4-17 November 2016, 26.

PROFIL PENULIS

Abdul Gaffar Karim & Longgina Novadona Bayo, keduanya merupakan dosen di FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Ahmad Najib Burhani. Doktor di bidang Religious Studies dari Universitas California-Santa Barbara. Bekerja sebagai peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Beberapa tulisannya adalah “*Lakum diinukum wa-liya diini*: The Muhammadiyah’s stance towards interfaith relations,” di jurnal *Islam and Christian-Muslim Relations* 2011, 22 (3): 329-342, *Muhammadiyah Jawah* (2010), “Revealing the Neglected Missions: Some Comments on the Javanese Elements of Muhammadiyah Reformism,” di jurnal *Studia Islamika* 2005, 12 (1): 101-129, *Sufisme Kota* (2001), *Islam Dinamis* (2001), dan “Defining Indonesian Islam: An Examination of the Construction of National Islamic Identity of Traditionalist and Modernist Muslims” di buku *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations* (Amsterdam: ICAS & Amsterdam University Press, 2012).

Ahmad Suaedy adalah Anggota Board Jaringan GusDurian dan Anggota Ombudsman RI. Pria yang punya pengalaman sebagai Peneliti dan Fasilitator ini adalah Direktur Eksekutif “The Wahid Institute” yang punya komitmen dan keprihatinan intelektual, mengenai agama, perdamaian, dialog, dan juga kesejahteraan masyarakat yang tujuannya, menunjukkan wajah Islam di Indonesia yang plural dan kultural. Dirinya mengambil Sarjana S1, Institute Agama Islam Negeri (IAIN), Yogyakarta dan tamat pada tahun 1990, lalu mengambil Pascasarjana S2 di Universitas Islam Negeri, Jakarta di tahun 2012. Selain itu dirinya juga sebagai LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial). Di tahun 2010-2013 menjadi Anggota Tim Riset “Capital City and Urban Politics in Southeast Asia,” CSEAS Kyoto University, di Jepang. Lalu selama Mei 2010 – September 2011 dirinya Melakukan riset tentang Minoritas Muslim di Singapore, Bali and Nusa Tenggara Timur dibiayai oleh Ford Foundation, Jakarta. Dan pada September 2010 hingga February 2011, Melakukan riset tentang Minoritas Muslim di Kamboja and Vietnam

sebagai Visiting Research Fellow at Center for Southeast Asian Studies (CSEAS)-Kyoto University, Jepang. Dan terakhir pada July 2009-March 2010, Melakukan riset tentang Minoritas Muslim di Filipina Selatan, Thailand Selatan dan Penang, Malaysia, sebagai Asian Public Intellectual (API) dibiayai oleh the Nippon Foundation.

Airlangga Pribadi adalah Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Direktur Centre of Statecraft and Citizenship Studies. Memperoleh gelar Ph.D di Asia Research Centre Murdoch University

Alimatul Qibtiyah adalah Dosen KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah. Dapat dihubungi di alamat email: alimatulqibty@gmail.com; alimatul.qibtiyah@uin-suka.ac.id

Fiqh Vredian Aulia Ali adalah Penerima Maarif Fellowship 2015. Sarjana S-1 Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kelahiran Banyuwangi, 23 Oktober 1994 ini merupakan Direktur Unit Kegiatan Mahasiswa LKP2M. Selain itu juga aktif dibeberapa kegiatan lainnya di antaranya sebagai Reporter Majalah Kemahasiswaan Suara Akademika, anggota Unit Mahasiswa HTQ, Anggota ILP2MI, Kabiro Kajian dan Penelitian LKP2H Malang, dan Wakil Sekretaris Umum Bidang P3A HMI Cabang Malang Komisariat Syari’ah-Ekonomi UIN Malang. Beberapa karya tulis yang pernah diterbitkan di antaranya; *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Malang: Setara Institute, 2015), *Fikih Mazhab Indonesia: Pemikiran Ijtihad Qodri Azizy dalam Konteks Pembaruan Hukum Islam Indonesia* (Lorong: Journal of Social and Cultural Studies, Vol. 3, No. 2, 2014), *Mengurai Benang Kusut Korupsi* (Opini, Koran Pendidikan, Edisi 505/III/19-25 Maret 2014), *Euforia Spiritual Konsumerisme Ramadhan* (Opini, Malang Post, 20 Juli 2013), *Langkah Gontai Gerakan Pramuka* (Opini, Malang Post, 14 Agustus 2013), *Menghadang Terorisme*, (Citizen Reporter, Surya, 2 Desember 2014), *Yang Mencari Kemenangan* (Citizen Reporter, Surya, 20 Juli 2014), *Idealisme Tak Terbeli* (Citizen Reporter, Surya, 8 Juni 2014), *Syarat Peneliti Pemula* (Citizen Reporter, Surya, 20 Maret 2014), *Berumah di Atas Angin* (Citizen Reporter, Surya, 20 Januari 2014), *Mbah Google Bukan Segalanya* (Citizen Reporter, Surya, 25 Juli 2013), *Tahanus di Rowo Bayu* (Citizen Reporter, Surya, 16 Agustus 2013), *Mengoreksi Terorisme dan Jihad* (Citizen Reporter, Surya, 16 September 2013), *Memakmurkan Serambi Masjid* (Citizen Reporter, Surya, 9 Juli 2013), dan *Air Mata di Tanah Mbojo* (Cerpen, dalam Antologi Cerpen FLP Ranting UIN Maliki Malang - Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013).

Hilman Latief Lulus S1 pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999. Menamatkan studi S2 pada Jurusan Ilmu Perbandingan Agama Universitas Gadjah Mada tahun 2003 dan di Michigan State University Amerika. Menyelesaikan Program Doktor di Leiden University Belanda tahun 2012. Ia merupakan Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beberapa karyanya ialah “kontributor buku *Hermeneutika Alqurán Mazhab Yogyā* (2003); editor buku *Islam dan Pengembangan Disiplin Ilmu* (2003); *Nasr Hamid Abu Zaid dan Kritik Teks Keagamaan* (2003); dan *Melayani Ummat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (2010).

Mark Woodward dan Amanah Nurish. Mark adalah Associate Professor di Center for the Study of Religion and Conflict di Arizona State University. Ia menempuh pendidikan di University of Illinois dan the University of Chicago. Ia juga merupakan penulis dan editor beberapa buku mengenai agama, politik dan budaya di Indonesia. **Amanah Nurish**, peneliti dan pegiat di bidang religious studies khususnya kajian agama minoritas di Asia Tenggara. Menyelesaikan program Master of Art (M.A) di CRCS UGM. Ia menyelesaikan program doktor (Ph.D) di Indonesian Consortium for religious studies (ICRS) Yogyakarta dengan menulis karya disertasi tentang agama Baha'i dan perlawanan kaum petani di Thailand. Saat ini bekerja sebagai peneliti di CSRC (Center for The Study of Religion and Conflict) Universitas Arizona, USA. Selaian aktif di berbagai kegiatan peacebuilding dan interfaith dialogue, ia juga aktif menulis antara lain: *Shi'ite and The Birth of Baha'i Faith In Iran* (Book chapter, ISASU, Kyoto University, 2016). *The Meta-Narrative of Peasant Religious Conversion: A Case Study in Baha'i's Community in Thailand* (Journal En Arche, 2016). *Perjumpaan Baha'i Dan Syiah Di Asia Tenggara: Paradoks Munculnya Imam Mahdi Di Abad Modern* (Jurnal Maarif, 2015) *Sufism, Pluralism, and Democracy* (Book chapter, 2015, Equinox Pub. U.K) *Peta Pandangan Keagamaan Dalam Keluarga Berencana* (Book, 2013, Yayasan Rumah Kita Bersama). *Welcoming Baha'i: New Official Religion In Indonesia* (The Jakarta Post, 2014). *When Predator of Children Teach at Urban School* (Colombo Telegraph, Sri Lanka, 2014) *Halal Labeling: The Next Gold Mine* (The Jakarta Post, 2014), dll.

Muhammad Wildan adalah dosen UIN Sunan Kalijaga sekaligus Direktur Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dapat dikontak di wildan71@gmail.com

Mohammad Iqbal Ahnaf merupakan peneliti di Program Studi Agama dan Lintas-Budaya Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana UGM

Moch Nur Ichwan, meraih gelar PhD-nya dalam bidang *Religious Studies* dan Politik Islam dari Tilburg University, Belanda (2006), dan sekarang sebagai Koordinator Program Doktor Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di antara publikasi terakhirnya: “Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy,” dalam Martin van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the ‘Conservative Turn’*, Singapore: ISEAS, 2013; dan “Neo-Sufism, Shari‘atism, and Ulama Politics: Abuya Shaykh Amran Waly and Tauhid-Tasawuf Movement in Post-Conflict Aceh,” dalam C. van Dijk dan N. Kaptein (Eds.), *Islam, Politics and Change: The Indonesian Experience after the Fall of Suharto*, Leiden: Leiden University Press, 2016.

Rizky Alif Alvian adalah penerima Maarif Fellowship dari Maarif Institute for Culture and Humanity pada tahun 2015. Ia menyelesaikan pendidikannya di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2017. Ia kini menjadi peneliti di Institute of International Studies (IIS) di institusi yang sama. Ia mengasistensi riset *Does Intolerance Always Matter: Dynamic Coexistence of Pluralism and Radical Islamism in Java* (bersama Hakimul Ikhwan, et. al., 2015) dan menulis sejumlah artikel, seperti “Melihat Yogyakarta Berubah: Praktek Kewargaan Radikal dan Perubahan Praktek Toleransi di Yogyakarta”, dalam *Fenomena Sektarianisme di Indonesia* (2015), “The Cosmopolitanism of YB Mangunwijaya”, *IJIS*, Vol. 2, No. 2, December 2015, dan “Citizenship and the Politics of Space in Indonesia: Reflections on the Politics of Pluralism in DI Yogyakarta”, makalah dipresentasikan *From Clients to Citizens? Citizenship in Democratising Indonesia*, Universitas Gadjah Mada-KITLV-KNAW, Yogyakarta, 8-10 December 2016.

Zainal Abidin Bagir, Ph.D. adalah Ketua Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), program Master di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Indonesia. Dia juga anggota Dewan Wali Amanat Konsorsium Indonesia Studi Agama (ICRS-Yogya) mewakili UGM.

Zuly Qodir adalah pengajar Sosiologi Agama dan Sosiologi Politik Islam di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, juga dosen di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah

Mada Yogyakarta. Ia juga merupakan Peneliti Senior MAARIF Institute for Culture and Humanity. Menjadi anggota Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah 2005-2010, pernah juga sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan Majalah Suara Muhammadiyah, dan peneliti di Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM. Menamatkan program DOktor dalam bidang Sosiologi Agama tahun 2006. Menulis artikel di berbagai jurnal dan menulis beberapa buku seperti *Gerakan Sosial Islam* (Pustaka Pelajar, 2009), *Islam Syariah versus Negara* (Pustaka Pelajar, 2008), *Nabi-nabi Baru di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2007), *Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2006), *Islam Liberal di Indonesia* (2005), dan *Syariah Demokratik* (2004). Melakukan riset *Gerakan Radikal di Indonesia*, *Kearifan Lokal di Ambon*, dan *Konflik Pertanahan di Kabupaten Siak* 2012. Ia lahir di Banjarnegara 22 Juli 1971. Bersama istri mengasuh dua orang putra-putri. Bisa dihubungi melalui email: zuly_qodir@yahoo.com.



MAARIF INSTITUTE FOR CULTURE AND HUMANITY

Statuta pendirian MAARIF Institute *for Culture and Humanity* (2002) menyatakan komitmen dasar lembaga ini sebagai gerakan kebudayaan dalam konteks keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Tiga area ini merupakan hal pokok dan terpenting dalam perjalanan intelektualisme dan aktvisme Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan mantan Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP).

Keberadaan MAARIF Institute merupakan bagian tidak terpisahkan dari jaringan gerakan Pembaruan Pemikiran Islam (PPI) yang ada di Indonesia dewasa ini. Gerakan pembaruan merupakan sebuah keniscayaan sekaligus tuntutan sejarah. Kompleksitas masalah kemanusiaan modern berikut isu-isu kontemporer yang mengikutinya seperti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, gender, dialog antar-agama dan peradaban serta sederet isu lainnya menuntut pemahaman dan penjelasan baru dari ajaran Islam.

Disadari pula bahwa program serta aktivitas MAARIF Institute tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan sosiologis persyarikatan Muhammadiyah, meskipun tidak ada hubungan organisatoris dengan organisasi ini dan tanpa mengurangi komitmen untuk terus memperluas radius pergaulan lembaga. Muhammadiyah, menurut banyak kalangan, sering dianggap sebagai representasi gerakan modernis-moderat di Indonesia yang aktif mempromosikan pemikiran-pemikiran Islam, berdakwah, dan melakukan aksi-aksi sosial. Oleh karena itu, memperjuangkan arus pembaruan pemikiran Islam dalam konteks gerakan Muhammadiyah merupakan concern utama MAARIF Institute sebagai bagian dari upaya pencerahan sekaligus memperkuat elemen moderat (*empowering moderates*) di Indonesia.

VISI

Menjadi lembaga pembaruan pemikiran dan advokasi untuk mewujudkan praksis Islam sehingga keadilan sosial dan kemanusiaan menjadi fondasi keindonesiaan sesuai cita-cita sosial dan intelektualisme Ahmad Syafii Maarif.

MISI

1. Mendorong aktualisasi nilai-nilai demokrasi, HAM, dan kebinekaan untuk memulihkan keadaban publik, saling menghargai, dan kerjasama yang konstruktif bagi keindonesiaan dan kemanusiaan.
2. Memperkuat dan memperluas partisipasi masyarakat sipil dan generasi muda untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang berkeadilan atas dasar kebinekaan.

Nilai Dasar

Egaliter

Non-diskriminasi

Toleran

Inklusif

Pengorganisasian

Yayasan Ahmad Syafii Maarif

- Jeffrie Geovanie
- Rizal Sukma
- Suyoto

Dewan Pembina:

- Abdul Munir Mulkan
- Abd. Rohim Ghazali
- Clara Joewono
- Haedar Nashir
- Luthfi Assyaukanie
- M. Amin Abdullah
- Muhamad Effendy
- Raja Juli Antoni

Eksekutif:

Direktur Eksekutif	: Fajar Riza Ul Haq
Direktur Program Islam <i>for Justice</i>	: M. Abdullah Darraz
Direktur Riset	: Ahmad Imam Mujadid Rais
Manajer Program Islam dan Media	: Khelmy K. Pribadi
Manajer Operasional	: Endang Tirtana
Asisten Program	: Pipit Aidul Fitriyana
Asisten Program	: Deni Murdiani
Sekretaris	: M. Supriadi
Keuangan	: Henny Ridhowati
Administrasi	: Pripih Utomo
<i>Office Boy</i>	: Awang Basri
Keamanan	: Kadarisman
	: Achmad Dwi Setiawan

MAARIF Institute's Associate Researcher

- Ahmad Fuad Fanani, Ph.D. Cd.
- Ahmad Najib Burhani, Ph.D.
- Ahmad Norma Permata, Ph.D.
- Ai Fatimah Nur Fuad, Ph.D.
- Alpha Amirrachman, Ph.D.
- Andar Nubowo, D.E.A.
- Benni Setiawan, M.S.I.
- David Krisna Alka, S.Th.I.
- Dewi Candraningrum, Ph.D.
- Emran Quresy, Ph.D.
- Herizal Effendi
- Hilman Latief, Ph.D.
- Irfan Amalee, MA.
- Muhammad Hilaly Basya, Ph.D.
- Nader Hashemi, Ph.D.
- Pradana Boy ZTF, Ph.D.
- Putut Widjanarko, Ph.D.
- Rebea Volkmann, Ph.D.
- Rudi Sukandar, Ph.D.
- Siti Sarah Muwahidah, MA.
- Sukidi Mulyadi, Ph.D.Cd.
- Syamsu Rizal Panggabean, M.Sc.
- Tuti Alawiyah Burhani, Ph.D.
- Wahyudi Akmaliah Muhammad, M.A.
- Yayah Khisbiyah, Ph.D.Cd.
- Dr. Zakiyuddin Baidhawy
- Dr. Zuly Qodir

PROFIL JURNAL MAARIF

MAARIF: ARUS PEMIKIRAN ISLAM DAN SOSIAL adalah jurnal refleksi-kritis Pemikiran Islam dan Sosial. Jurnal ini diterbitkan oleh MAARIF Institute *for Culture and Humanity*, dengan frekuensi terbit 2 kali setahun (Juni, Desember).

Jurnal MAARIF merupakan ruang bagi diskursus pemikiran kritis para cendekiawan, agamawan, peneliti, dan aktivis mengenai isu-isu keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Di antara beberapa cendekiawan yang pernah berkontribusi dalam penerbitan jurnal ini adalah Abdul Munir Mulkhan, Ahmad Jainuri, Ahmad Syafii Maarif, Andreas A. Yewangoe, Anhar Gonggong, Ariel Heryanto, Asvi Warman Adam, Donny Gahral Adian, F. Budi Hardiman, Franz Magnis-Suseno, M. Amin Abdullah, M.C. Ricklefs, Mohamad Sobary, Ratna Megawangi, Reed Taylor, Saparinah Sadli, Syafiq A. Mughni, Vedi R. Hadiz, Yudi Latif, dan beberapa tokoh lainnya.

Hingga saat ini keberadaan Jurnal MAARIF telah menginjak volume ke-8. Hal ini menandaskan eksistensi jurnal MAARIF yang telah berusia sembilan tahun. Dalam rentang waktu yang demikian tersebut, jurnal MAARIF telah mengalami serangkaian perubahan ke arah penyempurnaan dirinya. Dan sampai saat ini proses tersebut masih terus digalakkan.

Jurnal MAARIF diarahkan untuk menjadi corong bagi pelembagaan pemikiran-pemikiran kritis Buya Ahmad Syafii Maarif dalam konteks keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Beberapa isu yang menjadi konsen jurnal ini adalah tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Isu-isu lain yang juga menjadi perhatian jurnal ini adalah soal kemiskinan, kekerasan atas nama agama, terorisme dan berbagai persoalan kebangsaan dan kemanusiaan yang mengemuka dalam kehidupan Indonesia kontemporer.

Jurnal MAARIF berupaya untuk mendorong terciptanya pembaruan pemikiran yang berkorelasi positif bagi terwujudnya praksis sosial-Islam yang berkeadilan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, jurnal MAARIF diharapkan mampu menjadi ruang bagi aktualitas diskursus gerakan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia yang mengarah pada perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam kerangka pemikiran di atas, jurnal MAARIF diharapkan mampu berkontribusi bagi penyegaran pemikiran keagamaan dan kemanusiaan dalam konteks keindonesiaan yang majemuk.

PROFIL MEDIA

Nama Media, Penerbit, dan Motto

ISSN : 1907-8161

Nama Media : Jurnal MAARIF

Penerbit : MAARIF Institute *for Culture and Humanity*

Motto : Arus Pemikiran Islam dan Sosial

Bentuk : Jurnal Refleksi-Kritis

Format dan Jumlah Halaman

Sampul : Soft Cover

Format : Jurnal

Kertas : Book Paper, 70 gram

Isi : 150-250 halaman

Waktu Terbit dan Jumlah Eksemplar

Waktu terbit : 2 kali setahun (Juni dan Desember)

Jumlah eksemplar : 2.000 eks.

Tujuan dan Target Media

1. Menumuhukan diskursus pemikiran keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan yang merupakan konsen intelektualitas dan aktivitas Ahmad Syafii Maarif di kalangan masyarakat.
2. Menjadi corong dan ruang bagi dialektika pemikiran-pemikiran kritis tentang Islam, demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme.
3. Menyuarkan isu-isu perubahan kebijakan publik dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

KARAKTER MEDIA

Reflektif-Kritis

Jurnal ini mencoba melakukan refleksi kritis terkait isu-isu keislaman dan sosial-kemanusiaan yang berkembang di Indonesia.

Analitis

Jurnal ini mencoba melakukan kajian secara mendalam terhadap berbagai permasalahan yang berkembang, terutama terkait isu-isu Islam dan demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan berbagai masalah kebangsaan yang berkembang dewasa ini.

Informatif

Jurnal ini berupaya memberikan keterangan, penjelasan, dan deskripsi dalam bentuk informasi mengenai tema-tema tertentu dalam lingkup kajian keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.

Transformatif

Jurnal ini berupaya melakukan transformasi ilmu menuju sebuah perubahan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

RUBRIKASI

Artikel Utama

Menyajikan lima sampai sepuluh tulisan utama refleksi kritis beberapa cendekiawan, agamawan, akademisi, dan peneliti yang membahas tema utama hasil riset redaksi. *Artikel Utama* akan menjadi *mainstream* kajian dalam jurnal MAARIF ini.

Riset

Rubrik ini berisi tulisan-tulisan mengenai tema utama yang diangkat berdasarkan riset dan kajian empiris.

Khazanah Lokal

Rubrik ini menghadirkan catatan khas tentang tokoh-tokoh lokal yang pernah menerima MAARIF Award sebagai sosok yang memberikan inspirasi pada nilai-nilai kepemimpinan lokal, toleransi dan teladan pluralisme.

Refleksi

Sebuah kolom yang khusus menampung pemikiran reflektif tentang situasi keindonesiaan mutakhir.

Resensi

Rubrik ini membahas buku-buku terbaru mengenai tema-tema yang sesuai dengan isi dari Refleksi Utama pada Jurnal MAARIF ini.

PEMASARAN

Target Pembaca

- Kalangan Muhammadiyah (anggota dan pengurus)
- Cendekiawan dan intelektual di Indonesia
- Tokoh Lintas Agama
- Akademisi (guru, pelajar, dosen, dan mahasiswa)
- Aktivis-aktivis yang tergabung dalam jaringan organisasi *civil society* MAARIF Institute

Klasifikasi Pembaca

Segmen inti : Muhammadiyah dan Jaringan organisasi *civil society* MAARIF Institute seluruh Indonesia.

Segmen pelapis : Akademisi, Pelajar, Guru, Tokoh Intelektual, Mahasiswa, dan Forum kajian di internal & eksternal kampus.

Karakteristik Pembaca

- Kalangan Muhammadiyah yang memiliki antusiasme terhadap tumbuh dan berkembangnya pembaruan pemikiran Islam di Indonesia.
- Jaringan organisasi *civil society* yang *concern* terhadap perubahan sosial di Indonesia ke arah yang lebih baik dan adil.
- Kalangan akademisi yang respek terhadap perkembangan isu-isu kontemporer soal keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.
- Kalangan lintas-agama yang *concern* atas isu-isu keragaman, pluralitas, multikultural.

PETUNJUK DAN FORMAT PENULISAN ARTIKEL

1. MAARIF hanya memuat artikel atau esai hasil refleksi, riset, atau kajian kritis yang belum pernah dipublikasikan mengenai tema-tema yang ditetapkan oleh redaksi berdasarkan Term of Reference yang dibuat.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia dengan batas minimal panjang tulisan 4.000 kata (10 halaman) dengan batas maksimal 6000 kata (15 halaman), 1 spasi, A4; dilengkapi dengan abstrak maksimal 100 kata, dan kata-kata kunci maksimal 7 kata.
3. Artikel memuat: Judul, Nama Penulis (beserta deskripsi biodata singkat dan alamat e-mail pribadi), Abstrak (dalam bahasa Indonesia), Kata-kata Kunci (dalam bahasa Indonesia), Pendahuluan (tanpa anakjudul), Subjudul-subjudul (sesuai kebutuhan), Penutup, dan Daftar Pustaka (bahan rujukan).
4. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap dalam Catatan Kaki dengan urutan: Nama Lengkap Pengarang, Judul Lengkap Sumber, Tempat Terbit, Penerbit, Tahun Terbit, dan nomor halaman. Rujukan dari internet harap mencantumkan halaman http secara lengkap serta tanggal pengaksesannya.
5. Kutipan lebih dari empat baris diketik dengan spasi tunggal dan diberi baris baru. Kutipan empat baris atau kurang dituliskan sebagai sambungan kalimat dan dimasukkan dalam teks memakai tanda petik.
6. Daftar Pustaka diurutkan secara alfabetis, dan hanya memuat literatur yang dirujuk dalam artikel. Contoh:

Lijphart, Arend. *Democracy in Plural Societies*. New Haven: Yale University Press, 1977.

Skolimowski, Henryk, David Skrbina, and Juanita Skolimowski. *World As Sanctuary: The Cosmic Philosophy of Henryk Skolimowski*. Detroit: Creative Fire Press, 2010.

Glazer, Sidney, and A L. Tibawi. "Review of American Interests in Syria, 1800-1901: a Study of Educational, Literary and Religious Work." *The American Historical Review*. 73.1 (1967): 187-188.